



WALIKOTA MADIUN

NOTA KESEPAKATAN

NOMOR : 188 / 10 / 401.011 / 2022

NOMOR : 188 / 14 / 401.040 / 2022

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

WALIKOTA MADIUN

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11 - 08 - 2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.** : Walikota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **ANDI RAYA BAGUS M. S, SH** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun
3. **Drs. ISTONO, M.Pd** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun
4. **Drs. H. ARMAYA** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun


dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang beralamat di Jalan Taman Praja Nomor 97 Madiun selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**


menyatakan bahwa :


1. **PIHAK KEDUA** telah membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 yang akan dijadikan dasar dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat menerima dengan baik hasil pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 yang meliputi :
 - a. Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah ;
 - b. Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan Perangkat Daerah ;
 - c. Plafon Anggaran Sementara Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ; dan
 - d. Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.
3. Untuk proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan hasil Nota Kesepakatan bersama Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan anggota DPRD Kota Madiun.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


WALIKOTA MADIUN,
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.


KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN,
ANDI RAYA BAGUS M.S, SH

WAKIL KETUA,

Drs. ISTONO, M.Pd

WAKIL KETUA,

Drs. H. ARMAYA

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Dasar Hukum	2
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	6
2.1. Rencana Pendapatan Daerah	6
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah	7
2.1.2. Pendapatan Transfer	8
2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	11
2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan	15
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	16
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	229
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi	229
4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga yang	

dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi	313
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	315
BAB VI PENUTUP	317

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023	13
Tabel 3.1	Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Madiun	17
Tabel 3.2	Sinergitas Program Pemerintah Kota Madiun Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	19
Tabel 3.3	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Madiun dengan Prioritas Pembangunan Provinsi	24
Tabel 3.4	Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah	29
Tabel 3.5	Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	57
Tabel 4.1	Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	229
Tabel 4.2	Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan	314
Tabel 5.1	Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2023	315

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Komponen PAD Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	7
Gambar 2.2	Persentase Pertumbuhan PAD Kota Madiun Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.....	8
Gambar 2.3	Komponen Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	9
Gambar 2.4	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Transfer Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	9
Gambar 2.5	Komponen Pendapatan Transfer Pusat Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	10
Gambar 2.6	Komponen Pendapatan Dana Perimbangan Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	10
Gambar 2.7	Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	11
Gambar 2.8	Komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	12
Gambar 2.9	Persentase Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	12
Gambar 2.10	Komponen Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	15
Gambar 2.11	Pertumbuhan Pembiayaan Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara merupakan salah satu kewajiban Pemerintah daerah sebagai bagian dari mekanisme perencanaan/penganggaran, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PPAS dijabarkan sebagai dokumen yang menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing Perangkat Daerah (PD) berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan. Pagu anggaran ini dapat menjadi pagu definitif apabila peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disepakati oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ayat (1) Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan Rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Dalam ayat (4) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan :

- a. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. Menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan Program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah setiap tahun; dan
- c. Menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

Penyusunan PPAS Kota Madiun tahun 2023 berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Madiun Tahun Anggaran 2023, Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun tahun 2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun. PPAS selanjutnya dijadikan sebagai bahan pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang PPAS Kota Madiun Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing Perangkat Daerah.

PPAS Tahun Anggaran 2023 berisi tentang Rencana Pendapatan dan Pembiayaan Kota Madiun, Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan (urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang), program, kegiatan dan sub kegiatan dan rencana pembiayaan daerah. Dengan tersusunnya PPAS Tahun 2023 ini, diharapkan pelaksanaan program prioritas daerah dan penggunaan anggaran tahun 2023 memiliki arah dan bingkai yang jelas dalam pelaksanaannya.

1.2. TUJUAN

PPAS Kota Madiun Tahun 2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menetapkan plafon anggaran sementara prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan berdasarkan RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023;
- c. Sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2023 pada masing-masing OPD yang dianggarkan melalui RAPBD Tahun Anggaran 2023;

1.3. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan PPAS Kota Madiun 2023 sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tahun 2023;
 29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;
 30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
 31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030;
 32. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 33. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 34. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.

35. Peraturan Waliikota Madiun Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2023.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Perkembangan realisasi penerimaan daerah dalam periode 2018-2021 dan proyeksi 2022-2023 menunjukkan adanya tren fluktuatif yang disebabkan oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal, apalagi mulai tahun 2020 terjadi tekanan terhadap ekonomi akibat pandemic Covid -19. Komponen pendapatan yang bisa diintervensi oleh pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Asli Daerah diharapkan memberikan kontribusi yang terus bertambah terhadap pendapatan daerah. Semua komponen PAD diharapkan terus tumbuh dalam memberikan kontribusi pendapatan, komponen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Adapun rencana penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu (SiLPA) menunjukkan fluktuasi dan diupayakan diminimalisasi melalui efektivitas pelaksanaan kegiatan dan akurasi perencanaan pendapatan. Peningkatan realisasi penerimaan tersebut, di samping merupakan hasil upaya Pemerintah Daerah, juga dipengaruhi oleh perkembangan kondisi makro ekonomi nasional dan daerah, faktor eksternal, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH

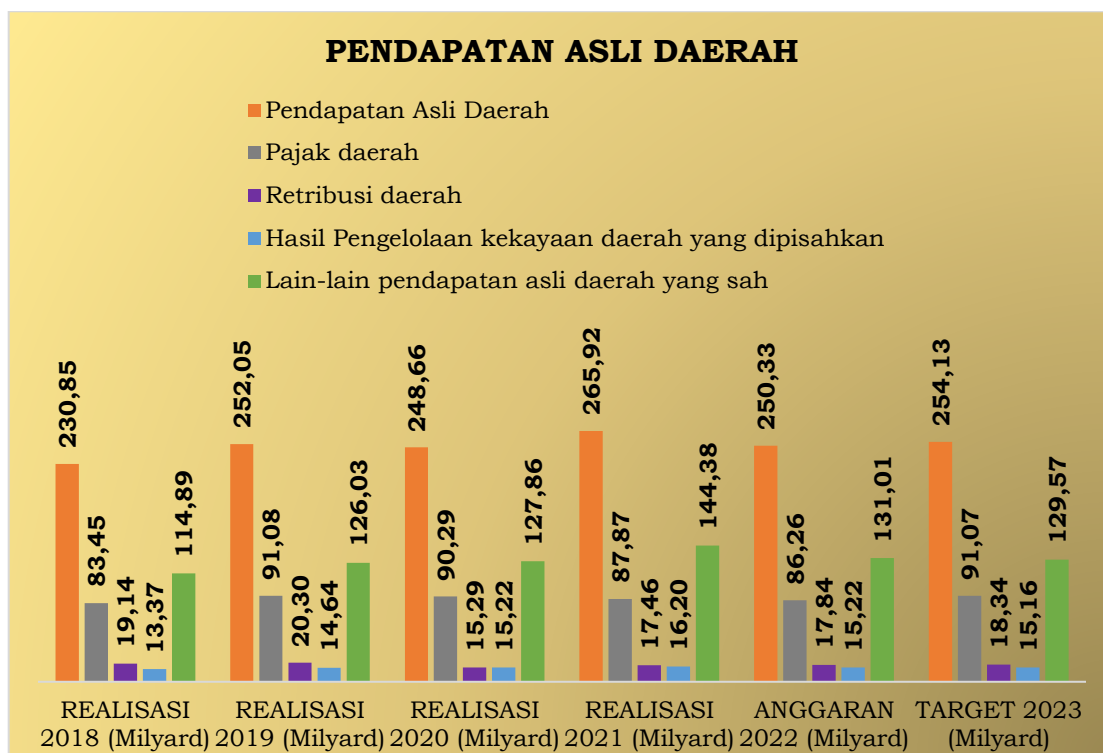
Dalam menentukan rencana pendapatan daerah, diupayakan untuk memperhatikan potensi yang ada dan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya serta tahun berjalan. Dari hal tersebut, selanjutnya pengeluaran dapat dilakukan dalam bentuk belanja daerah serta pembiayaan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Pendapatan daerah Kota Madiun tahun anggaran 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 3,06% atau menjadi Rp1.013.541.041.175,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp30.051.714.042,00 dibandingkan anggaran Tahun 2022. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya kenaikan pendapatan yang terjadi pada pendapatan asli daerah dan DBH-CHT serta pendapatan Transfer antar daerah (provinsi) sedangkan untuk pendapatan lainnya tidak mengalami perubahan. DBH-CHT mengalami kenaikan sebesar Rp2.161.408.000,00 atau naik 11,42% dari tahun 2021, Pendapatan Asli

Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp3.807.263.283,00 atau naik sebesar 1,52% dan Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp24.082.824.359,00 atau sebesar 39,23%. Keadaan ini karena secara nasional maupun global yang masih menghadapi wabah pandemi Covid-19, yang pasti untuk pemulihan kondisi perekonomian pasca pandemi.

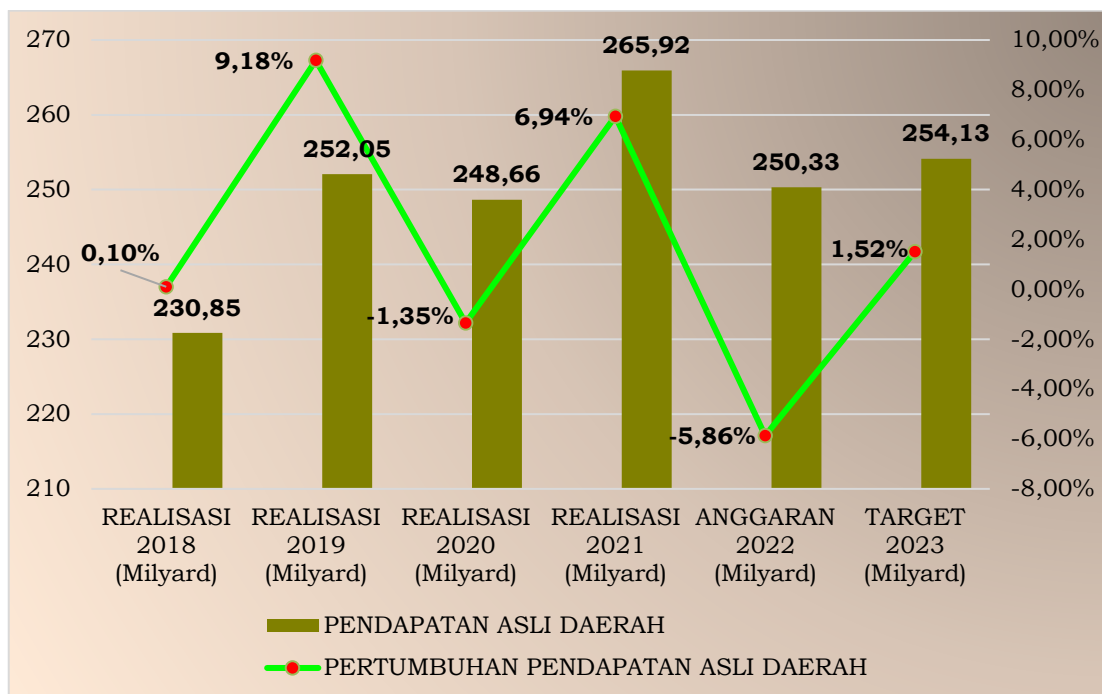
2.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 3,81% atau naik sebesar Rp30.051.495.642,00 dari jumlah anggaran pada Tahun 2022 atau menjadi sebesar Rp254.132.277.364,95.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 2. 1.
Komponen PAD Kota Madiun
Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022 data diolah

Gambar 2. 2.
Persentase Pertumbuhan PAD Kota Madiun
Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023

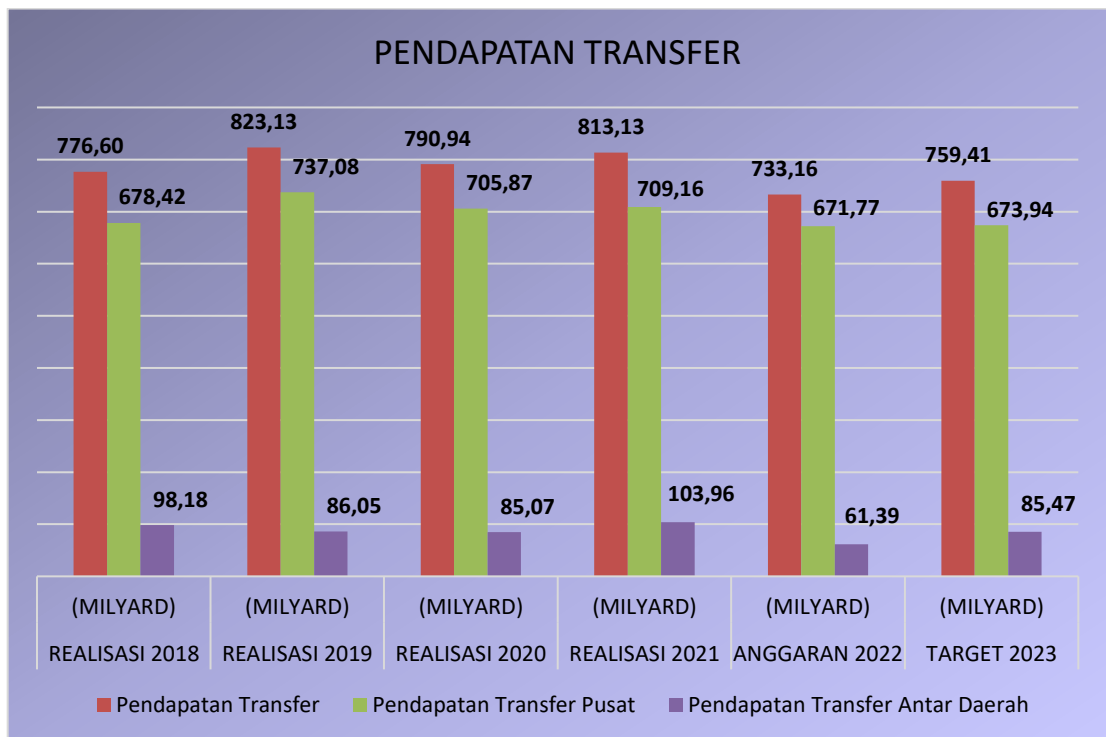
Komponen Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penyumbang terbesar dalam penentuan besarnya tingkat pendapatan asli daerah, yaitu mencapai Rp129.567.557.216,00 atau 50,98% dari nilai PAD untuk Lain-Lain PAD yang Sah dan Rp91.066.000.000,00 atau 35,83% dari nilai PAD untuk Pajak Daerah.

2.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Otonomi Khusus) serta Pendapatan Transfer Antar Daerah (Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya). Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Bagi Hasil Cukai, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Untuk tahun 2023 diproyeksikan sama dengan tahun anggaran 2022 (informasi resmi belum ada). Pendapatan Dana Transfer diproyeksikan masing-masing yaitu Pendapatan Transfer Pusat sebesar Rp673.936.270.000,00 dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp85.472.275.410,00.

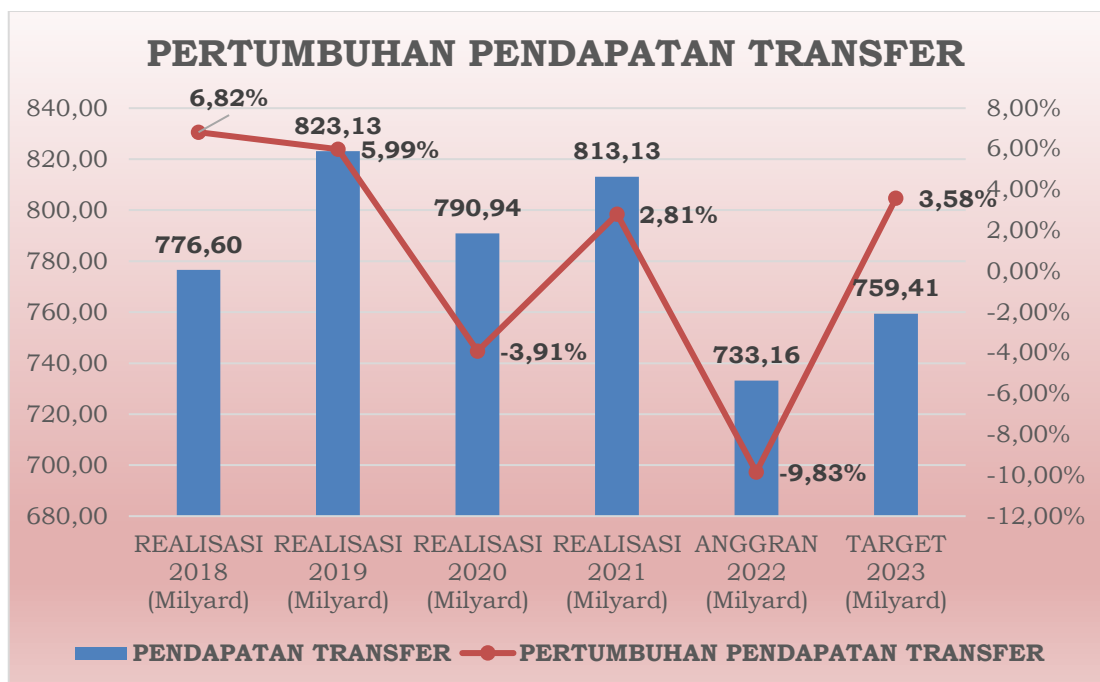
Pendapatan Transfer Kota Madiun pada tahun 2023 diproyeksikan Rp759.408.545.410,00. Kontribusi Dana Alokasi Umum masih mendominasi komponen Pendapatan Transfer dengan Dana Alokasi Umum yang

diproyeksikan sebesar Rp465.495.171.000,00 (asumsi sama dengan DAU tahun 2022).



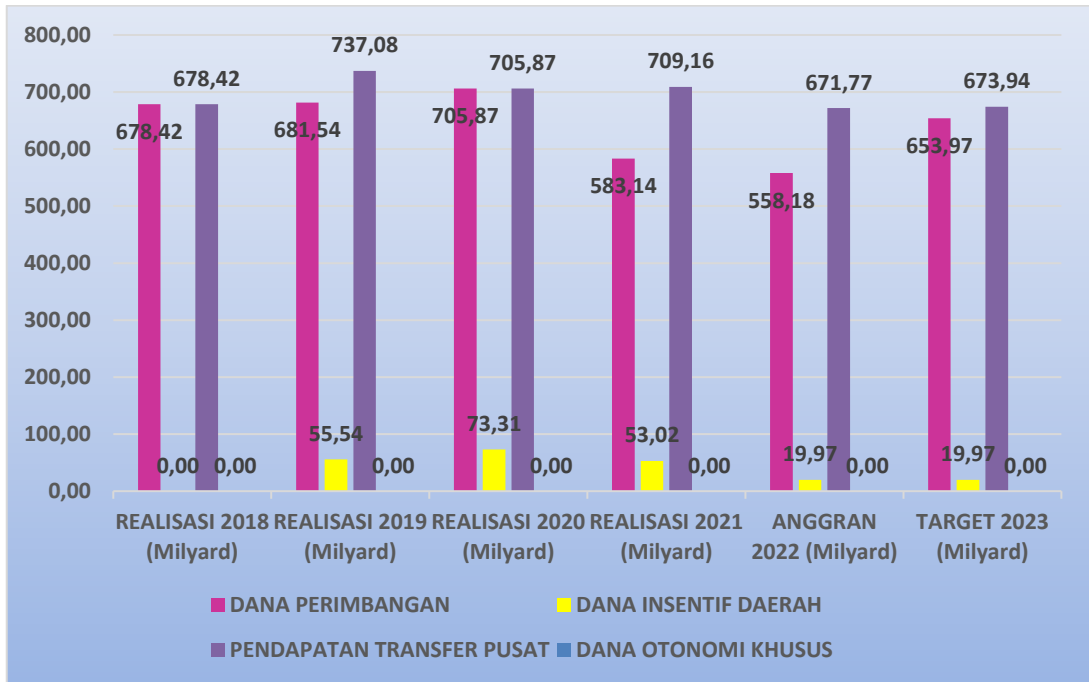
Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 2. 3.
Komponen Pendapatan Transfer
Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023



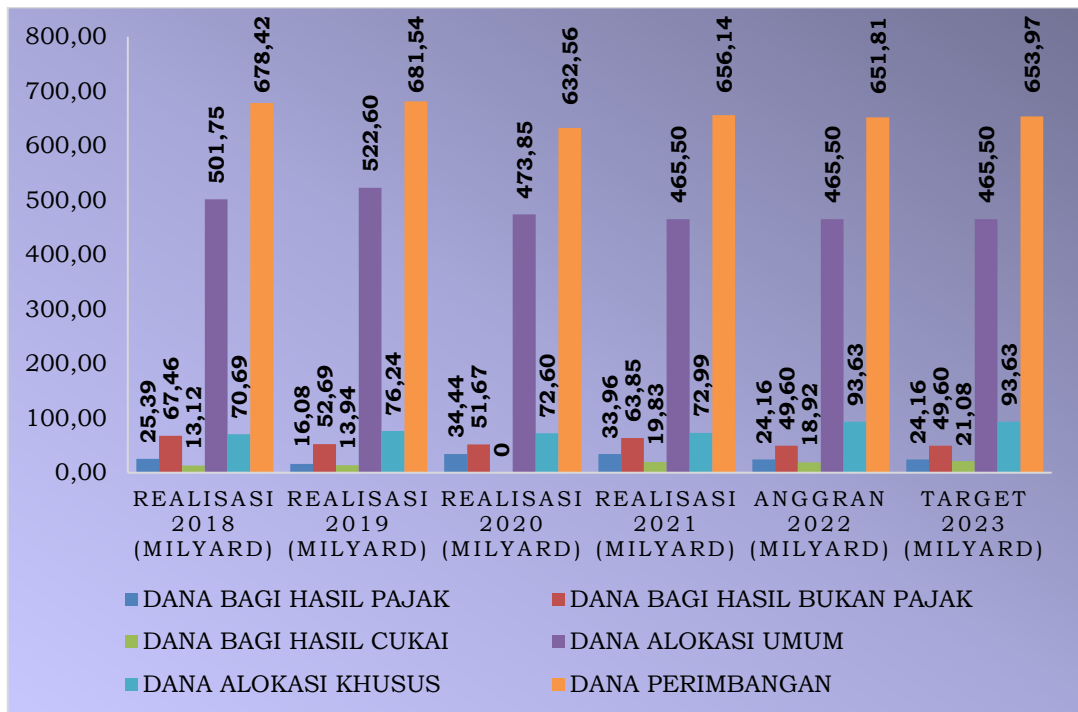
Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 2. 4.
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Transfer
Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023



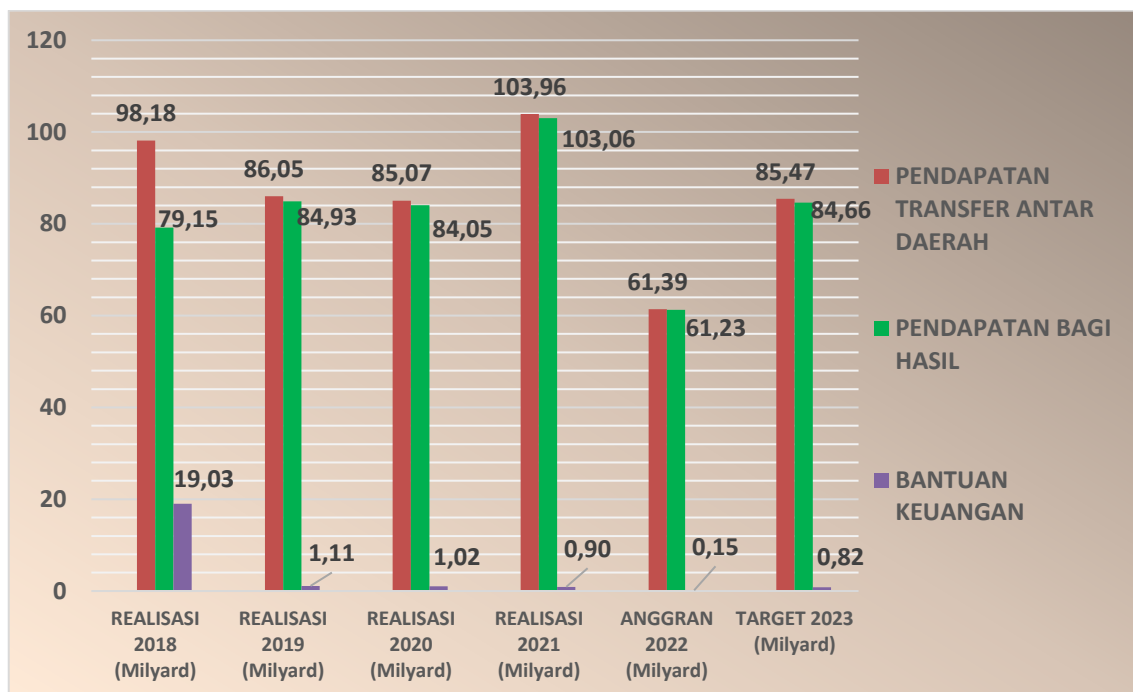
Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 2.5.
Komponen Pendapatan Transfer Pusat
Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 2.6
Komponen Pendapatan Dana Perimbangan
Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023

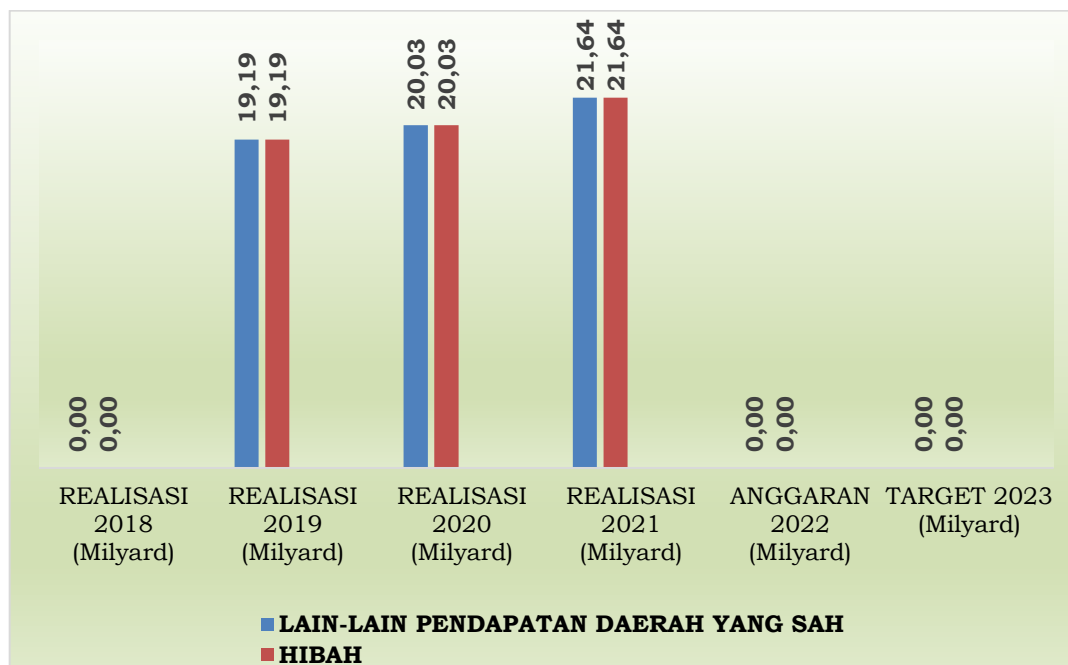


Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 2.7
Komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah
Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023

2.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Komponen penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, Dana Darurat serta Pendapatan Lainnya. Pada tahun 2023 proyeksi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kota Madiun sebesar Rp0,00 (asumsi sama dengan tahun sebelumnya), sebelum tahun 2023 komponen utamanya dana hibah yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), setelah Tahun 2022 dana BOS beralih menjadi DAK Non Fisik. Sehingga asumsi penerimaan dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sama dengan tahun 2022.



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 2.8
Komponen Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Kota Madiun
Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023



Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

Gambar 2.9
Persentase Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kota Madiun
Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023

Secara rinci, proyeksi Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023

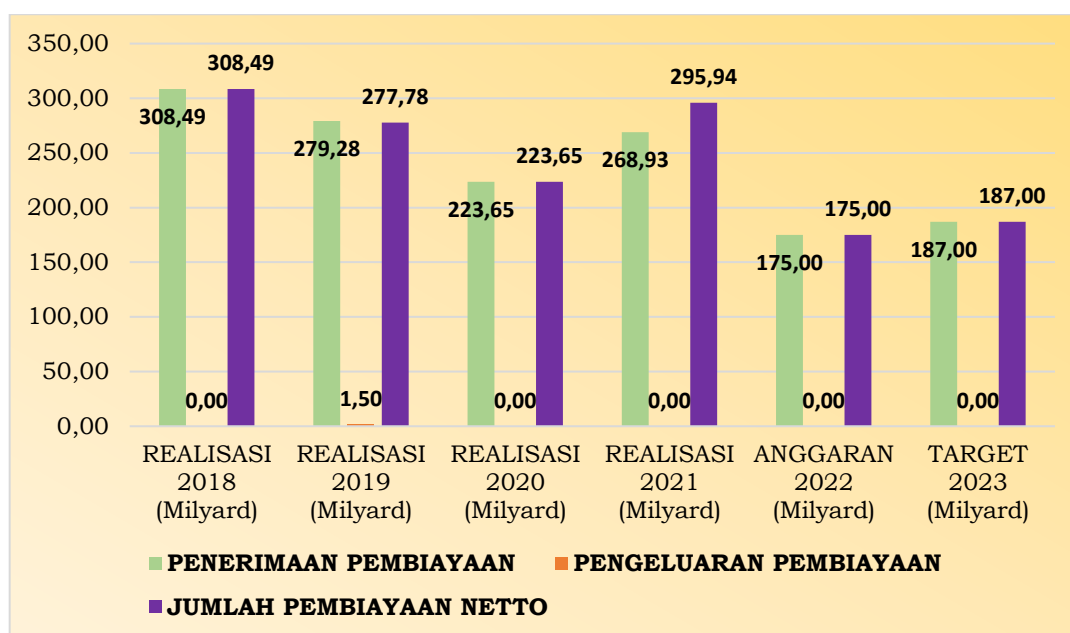
KODE	URAIAN	JUMLAH		% Naik/Turun
		ANGGARAN 2022	TARGET 2023	
1	PENDAPATAN			
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	250,325,014,082.00	254.132.495.765,00	1,52%
1.1.1.	Pajak Daerah	86,255,000,000.00	91.066.000.000,00	5,58%
1.1.2.	Retribusi Daerah	17,841,947,807.00	18.340.236.225,00	2,79%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15,216,268,562.00	15.158.702.324,00	-0,38%
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	131,011,797,713.00	129.567.557.216,00	-1,10%
1.2.	Pendapatan Transfer	733,164,313,051.00	759.408.545.410,00	3,58%
1.2.1	Pendapatan Transfer Pusat	671,774,862,000.00	673.936.270.000,00	0,32%
1.2.1.01	Dana Perimbangan	651,806,084,000.00	653.967.492.000,00	0,33%
1.2.1.01.01.1	Dana bagi hasil pajak	24,161,094,000.00	24.161.094.000,00	0,00%
1.2.1.01.01.2	Dana bagi hasil bukan pajak	49,596,509,000.00	49.596.509.000,00	0,00%
1.2.1.01.01.3	Dana Bagi hasil cukai	18,922,855,000.00	21.084.263.000,00	11,42%
1.2.1.01.01.4	Dana Alokasi Umum	465,495,171,000.00	465.495.171.000,00	0,00%
1.2.1.01.01.5	Dana Alokasi khusus	93,630,455,000.00	93.630.455.000,00	0,00%
1.2.1.01.02	Dana Insentif Daerah	19,968,778,000.00	19.968.778.000,00	0,00%
1.2.1.01.03	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	
1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	61,389,451,051.00	85.472.275.410,00	39,23%
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	61,234,672,051.00	84.656.513.410,00	38,25%
1.2.2.02	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	154,779,000.00	815.762.000,00	427,05%
1.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	
1.3.1.	Hibah	0,00	0,00	
1.3.2.	Dana darurat	0,00	0,00	
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	983,489,327,133.00	1.013.541.041.175,00	3,06%
2.	BELANJA DAERAH			
2.1.	BELANJA OPERASI	980,616,130,669.00	962.318.889.004,00	-1,87%
2.1.1.	Belanja Pegawai	493,730,745,957.00	485.959.400.862,00	-1,57%
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	444,965,688,854.00	441.819.946.847,00	-0,71%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	99.146.000,00	

KODE	URAIAN	JUMLAH		% Naik/Turun
		ANGGARAN 2022	TARGET 2023	
2.1.5	Belanja Hibah	16,823,187,778.00	13.514.968.195,00	-19,66%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	25,096,508,080.00	20.925.427.100,00	-16,62%
2.2	BELANJA MODAL	169,091,131,325.00	235.100.295.148,00	39,04%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	2,500,000,000.00	3.182.000.000,00	27,28%
2.1.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29,760,942,083.00	60.182.442.891,00	102,22%
2.1.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49,453,116,310.00	87.268.605.579,00	76,47%
2.1.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	84,822,087,152.00	80.200.363.080,00	-5,45%
2.1.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,554,985,780.00	4.266.883.598,00	67,00%
2.1.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	000	
2.3.	BELANJA TAK TERDUGA	8,782,065,139.00	3.121.857.023,00	-64,45%
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	8,782,065,139.00	3.121.857.023,00	-64,45%
2.4.	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	
2.4.1.	Belanja Transfer Ke Daerah Lain	0,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1,158,489,327,133.00	1.200.541.041.175,00	3,63%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(175,000,000,000.00)	(187.000.000.000,00)	6,86%
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	175.000.000.000,00	187.000.000.000,00	6,86%
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	175.000.000.000,00	187.000.000.000,00	6,86%
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	
3.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	175.000.000.000,00	187.000.000.000,00	6,86%
	SiLPA	0.00	0,00	

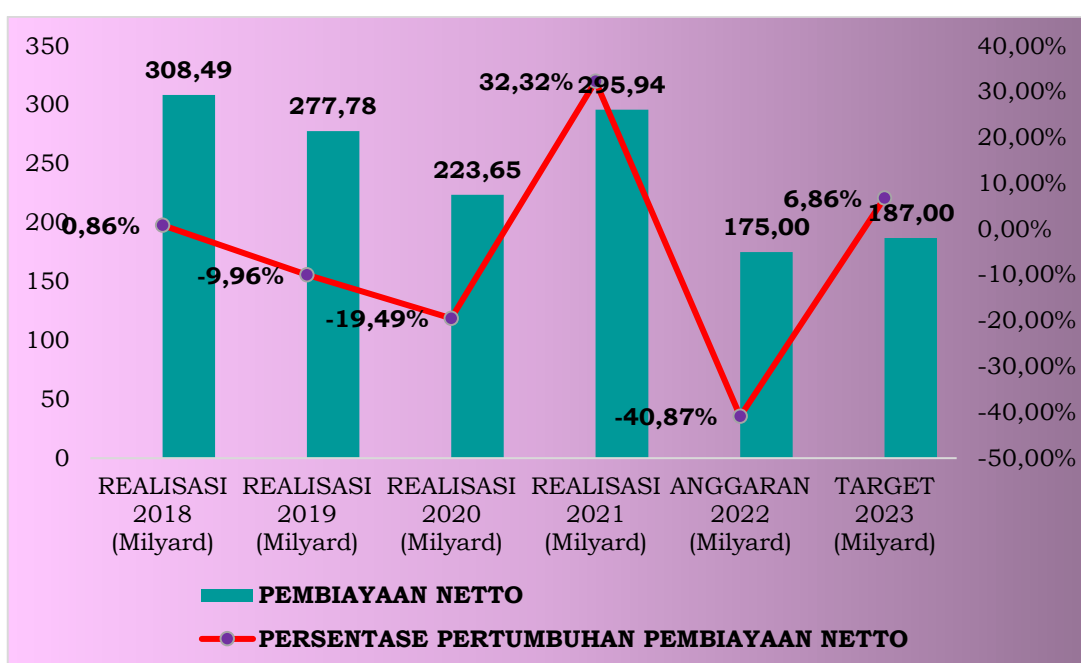
Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022, data diolah

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan Kota Madiun tahun 2023 berasal dari SILPA (Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya). Hal ini menyebabkan pada tahun 2022 target penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp187.000.000.000,00 juga berasal dari SILPA (Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya), dengan mempertimbangkan potensi riil dari pelampauan pendapatan dan realisasi belanja. Berikut gambar komponen penerimaan pembiayaan :



Gambar 2.10
Komponen Pembiayaan Kota Madiun
Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023



Gambar 2.11
Pertumbuhan Pembiayaan Kota Madiun
Tahun 2018 – 2022, dan Target Tahun 2023

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kota Madiun yang tertuang dalam RKPD 2023 pada intinya mempertimbangkan (1) visi Kota Madiun dalam RPJMD (2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Jawa Timur; (3) isu-isu strategis daerah; dan (4) evaluasi capaian kinerja RKPD Kota Madiun tahun 2022. Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan tujuan serta sasaran pembangunan sebagai akibat dampak pandemi covid-19, maka tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Sejahtera’**.

Pengambilan tema ini didasarkan pada kondisi eksisting dan juga perencanaan ke depan Kota Madiun dimana semakin pentingnya kemandirian dan daya saing ekonomi daerah yang ditopang sumberdaya manusia atau tenaga kerja yang handal, pengembangan pariwisata serta pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan industri kecil dan menengah. Selain itu, Penyiapan sumberdaya manusia yang handal melalui pelayanan memuaskan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur kota merupakan fokus dari tahun pertama RPJMD Kota Madiun 2019-2024.

Mengacu kepada prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun serta dengan memperhatikan kondisi, aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Madiun, prioritas nasional serta prioritas provinsi, maka Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2023 menetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. **Prioritas 1** : Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital.
2. **Prioritas 2** : Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia.
3. **Prioritas 3** : Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi
4. **Prioritas 4** : Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan

Selanjutnya masing-masing Program di dalam prioritas pembangunan Daerah Kota Madiun disinkronkan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur disesuaikan dengan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

Tabel 3.1

Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Madiun

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
<p>Prioritas Pembangunan 1:</p> <p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan</p>	<p>Prioritas Pembangunan 1:</p> <p>Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata</p>	<p>Prioritas Pembangunan 1:</p> <p>Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital</p>
<p>Prioritas Pembangunan 2:</p> <p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamain pemerataan</p>	<p>Prioritas Pembangunan 2:</p> <p>Penguatan Konektivitas Antarwilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur</p>	<p>Prioritas Pembangunan 4:</p> <p>Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan</p>
<p>Prioritas Pembangunan 3:</p> <p>Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing</p>	<p>Prioritas Pembangunan 3:</p> <p>Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence (AI)</i></p>	<p>Prioritas Pembangunan 2:</p> <p>Pembangunan kualitas infrastruktur berbasis lingkungan dan berkelanjutan</p>
<p>Prioritas Pembangunan 4:</p> <p>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p>	<p>Prioritas Pembangunan 4:</p> <p>Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal</p>	<p>Prioritas Pembangunan 2:</p> <p>Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia</p>
<p>Prioritas Pembangunan 5:</p> <p>Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p>	<p>Prioritas Pembangunan 5:</p> <p>Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</p>	<p>Prioritas Pembangunan 1:</p> <p>Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital</p>

Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Madiun
Prioritas Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 6: Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Prioritas Pembangunan 2: Akselerasi kualitas pembangunan sumber daya manusia
Prioritas Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Prioritas Pembangunan 7: Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Prioritas Pembangunan 3: Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi

Sumber : Bappenas RI, Bapperov Jatim dan Bapelitbangda Kota Madiun, 2022

Tabel 3.2.
Sinergitas Program Pemerintah Kota Madiun Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Keterangan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Penanganan Bencana	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase daerah rentan dan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase pangan segar aman yang teruji	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah total produksi perikanan tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi makan ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Efektivitas sarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase lahan aman bencana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan			

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Keterangan
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	Dinas Perdagangan	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	Dinas Perdagangan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Implementasi Sakip Setda	Sekretariat Daerah	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah fasilitas bina mental spiritual Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan				
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	
		Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	Dinas Pendidikan	
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	Dinas Pendidikan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Keterangan
				Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
4	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketaatan terhadap RTRW Presentase Rawan Banjir/Genangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Kawasan Permukiman	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Dinas Perhubungan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan terselesaikan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
7	Memperkuat Stabilitas Lingkungan Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketenteraman	Satuan Polisi Pamong Praja dan	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Keterangan
			dan Keindahan) yang diselesaikan	Pemadam Kebakaran	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil Presentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Akurasi database kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Implementasi Sakip Setda	Sekretariat Daerah	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Dearah	Inspektorat Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Kecamatan Manguharjo	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan	Kecamatan Manguharjo	

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Keterangan
			ketertiban umum di kecamatan		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Kartoharjo	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kartoharjo	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Kartoharjo	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Kecamatan Kartoharjo	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kecamatan Taman	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Status Kelembagaan Orkemas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang terfasilitasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tabel 3.3.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Madiun dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Keterangan
1	Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Penanganan Bencana	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase daerah rentan dan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase pangan segar aman yang teruji	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah total produksi perikanan tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi makan ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Efektivitas sarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase lahan aman bencana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Keterangan
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	Dinas Perdagangan	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	Dinas Perdagangan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Implementasi Sakip Setda	Sekretariat Daerah	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah fasilitas bina mental spiritual Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2	Penguatan Konektivitas Antarwilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur				
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Penguatan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
Program Pengelolaan Pendidikan		Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan		
Program Pengembangan Kurikulum		Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	Dinas Pendidikan		
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	Dinas Pendidikan		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan		
Program Pengelolaan Pendidikan		Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Program Pengembangan Jasa Konstruksi		Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program Perlindungan Perempuan		Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Keterangan
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
4	Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
5	Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketaatan terhadap RTRW Presentase Rawan Banjir/Genangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Kawasan Permukiman	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Dinas Perhubungan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan terselesaikan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	
6	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
7	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	Satuan Polisi Pamong Praja dan	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Keterangan
	bagi Masyarakat di Jawa Timur			Pemadam Kebakaran	
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil Presentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Akurasi database kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Implementasi Sakip Setda	Sekretariat Daerah	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Dearah	Inspektorat Daerah	

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Keterangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Kecamatan Manguharjo	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Kecamatan Manguharjo	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Kartoharjo	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kartoharjo	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Kartoharjo	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Kecamatan Kartoharjo	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kecamatan Taman	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Status Kelembagaan Orkemas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang terfasilitasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tabel 3.4.
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
Peningkatan inklusivitas ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan, ekonomi kreatif dan digital	a. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	764.802.900	
	b. Meningkatnya Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	240.371.000	
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	314.350.300	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	156.292.900	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	264.556.000	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	82.818.000	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	444.620.000	
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	59.995.000	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	200.075.406	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	89.492.950	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	210.795.438	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.486.263.847	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	34.700.000	
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	308.848.200	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan terselesaikan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	687.175.500	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	462.675.000	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	198.248.500	
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.101.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Perdagangan	11.074.865.806	
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	Dinas Perdagangan	164.204.400	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	Dinas Perdagangan	4.322.249.628	
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	Dinas Perdagangan	254.657.000	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	Dinas Perdagangan	214.569.024	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase produk perdagangan yang dipromosikan	Dinas Perdagangan	309.031.550	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	50.825.555.179	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.224.351.023	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Aset yang Dilindungi Persentase Pemanfaatan Aset Daerah Persentase Pengelolaan Aset yang dilindungi	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.939.948.000	
Akselerasi pembangunan daya manusia	kuualitas sumber a. Pengurangan Kemiskinan b. Meningkatnya Derajat kesehatan Masyarakat c. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat d. Meningkatnya Pemberdayaan Gender e. Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	185.583.777.393	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	57.557.373.126	
		Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	Dinas Pendidikan	5.256.616.906	
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	Dinas Pendidikan	1.609.200.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	615.921.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	213.127.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	238.556.000	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	634.126.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	317.626.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	639.613.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	237.766.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	608.658.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	233.007.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	204.655.000	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	228.732.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	405.962.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	391.431.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	214.117.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	631.589.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	363.725.500	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	230.770.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	368.189.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	595.796.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	663.960.000	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	330.088.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	284.162.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	219.149.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan	951.662.000 559.431.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	793.034.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	346.199.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	260.637.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	572.132.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	291.092.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	598.874.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	229.810.000	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	321.376.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	530.746.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	187.714.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	629.272.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	359.745.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	862.871.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	208.680.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	283.799.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	610.026.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	677.090.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	660.879.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	333.935.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	942.348.000	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	647.421.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	542.898.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	355.797.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	433.565.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	248.073.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	336.142.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	357.420.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	445.141.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	190.489.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	196.334.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	231.239.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	1.997.234.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	1.571.424.800	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	1.278.419.000	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	1.677.195.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	1.290.903.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	1.511.432.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	1.598.010.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	966.882.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	1.226.624.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	1.412.271.200	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	1.499.858.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	1.084.801.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	1.379.647.000	
		Program Pengelolaan Pendidikan	Wajib Belajar 9 Tahun	Dinas Pendidikan	842.557.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	55.745.191.817	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.157.720.997	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	198.360.350	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	96.205.700	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.482.254.780	
		Program Pengendalian Penduduk	Meningkatnya Jumlah SSK Meningkatkan Kampung KB yang berstandar paripurna	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	439.867.720	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Menurunnya Unmet Need	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.922.669.452	
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	909.868.900	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	101.587.028.523	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	43.393.310.611	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.439.665.000	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.018.616.600	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.313.990.000	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.991.095.000	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.982.959.000	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) kesehatan mencapai target	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.662.500.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.942.179.640	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.589.656.050	
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.635.853.661	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.466.050.900	
		Program Penanganan Bencana	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	657.016.400	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	182.250.680	
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	643.811.800	
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	165.000.000	
		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1.436.872.624	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.302.859.900	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Angka Kecukupan Energi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	289.962.000	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase daerah rentan dan rawan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	43.842.500	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase pangan segar aman yang teruji	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	86.182.500	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah total produksi perikanan budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	159.900.000	
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah total produksi perikanan tangkap	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	35.000.000	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi ikan Tingkat konsumsi makan ikan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	214.032.000	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Efektivitas sarana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.000.624.000	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	233.727.000	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	260.856.000	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase lahan aman bencana pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	112.370.000	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	65.000.000	
		Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	235.475.000	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.802.706.560	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	292.872.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.832.923.152	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.040.301.770	
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	205.737.656	
Peningkatan pelayanan publik berbasis smart city dan percepatan reformasi birokrasi	a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.865.404.195	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
	b. Meningkatnya kualitas pelayanan public	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	6.809.084.238	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.256.376.777	
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	264.677.400	
		Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	160.842.000	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Akurasi database kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	275.471.650	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.099.855.190	
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.019.065.320	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.802.706.560	
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Dinas Komunikasi dan Informatika	125.000.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.832.923.152	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	656.180.000	
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	162.762.100	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Implementasi Sakip Setda	Sekretariat Daerah	1.273.696.000	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Sekretariat Daerah	1.794.948.600	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	2.566.413.284	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	677.654.260	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	1.831.850.384	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Sekretariat Daerah	2.795.731.667	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Sekretariat DPRD	26.399.381.136	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	12.253.836.420	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.189.057.514	
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.417.459.130	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	977.516.400	
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.377.973.164	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	50.825.555.179	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.224.351.023	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah	9.074.685.028	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	1.302.297.752	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.117.062.899	
		Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.417.697.200	
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.459.306.900	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	9.760.159.864	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	386.115.900	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat Daerah	Inspektorat Daerah	794.648.700	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	Kecamatan Manguharjo	13.024.060.432	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Manguharjo	18.152.000	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Kecamatan Manguharjo	344.167.480	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Kecamatan Manguharjo	338.346.450	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Kecamatan Manguharjo	103.577.200	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Manguharjo	593.449.399	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Kecamatan Manguharjo	233.234.281	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Manguharjo	424.953.987	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Kecamatan Manguharjo	102.376.788	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Manguharjo	447.580.000	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Kecamatan Manguharjo	102.400.000	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Manguharjo	376.301.600	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Kecamatan Manguharjo	176.800.000	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Manguharjo	472.146.352	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Kecamatan Manguharjo	475.881.860	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Manguharjo	470.394.344	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Kecamatan Manguharjo	195.487.100	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Manguharjo	422.765.484	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Kecamatan Manguharjo	174.038.910	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Manguharjo	725.758.000	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Kecamatan Manguharjo	106.000.000	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Kecamatan Manguharjo	438.671.431	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	Kecamatan Manguharjo	566.110.500	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Kecamatan Kartoharjo	13.552.588.037	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kartoharjo	38.656.000	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Kartoharjo	353.186.800	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Kecamatan Kartoharjo	312.260.650	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	Kecamatan Kartoharjo	186.232.000	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kartoharjo	537.265.700	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Kartoharjo	41.503.794	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kartoharjo	463.782.228	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Kartoharjo	26.511.503	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kartoharjo	556.783.020	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Kartoharjo	349.638.969	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kartoharjo	505.787.293	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Kartoharjo	39.144.850	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kartoharjo	483.760.059	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Kartoharjo	30.080.050	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kartoharjo	425.042.900	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Kartoharjo	36.266.050	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kartoharjo	506.945.530	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Kartoharjo	54.381.650	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kartoharjo	467.384.605	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Kartoharjo	38.832.450	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Kartoharjo	474.324.030	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Kartoharjo	252.719.600	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	Kecamatan Taman	13.573.184.392	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Taman	21.998.400	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Taman	343.215.750	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Kecamatan Taman	338.399.400	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	Kecamatan Taman	108.919.600	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Taman	546.493.765	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Taman	119.263.000	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Taman	514.902.000	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Taman	120.574.272	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Taman	537.454.321	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Taman	129.786.400	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Taman	321.833.320	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Taman	121.108.612	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Taman	673.116.804	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Taman	43.000.000	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Taman	551.971.326	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Taman	54.344.900	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Taman	491.145.017	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Taman	262.088.280	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Taman	523.445.596	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Taman	80.288.700	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Taman	605.582.116	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Taman	236.434.981	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.093.015.274	
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	314.049.297	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.900.062.030	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Status Kelembagaan Orkemas	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	185.337.000	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	593.661.370	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik yang terfasilitasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.711.599.350	
Pembangunan infrastruktur lingkungan berkualitas berbasis dan berkelanjutan	a. Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.714.687.105	
	b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase ketaatan terhadap RTRW Persentase Rawan Banjir/Genangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.574.216.000	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.869.000	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.188.093.000	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.642.900.000	
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.964.000.895	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi mantab	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41.965.000.000	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	679.650.000	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.250.000.000	
		Program Kawasan Permukiman	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.723.441.600	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.677.447.900	
		Program Pengelolaan Izin Lokasi	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.000.000	
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	36.200.000	
		Program Penatagunaan Tanah	Prosentase Penatagunaan Tanah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	80.000.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.386.841.000	
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.412.859.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	18.197.299.571	
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	Dinas Lingkungan Hidup	315.429.000	
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	Dinas Lingkungan Hidup	923.491.779	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	76.700.000	
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup	75.000.000	
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	342.740.000	

Prioritas Kota Madiun	Sasaran Prioritas	Program	Indikator Kinerja	Skpd Pelaksana	Jumlah Pagu	Keterangan
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Prosentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	614.764.500	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup	100.000.000	
		Program Pengelolaan Persampahan	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dinas Lingkungan Hidup	4.304.290.776	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Dinas Perhubungan	11.429.468.520	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	Dinas Perhubungan	7.110.085.176	

Tabel 3.5.
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

No	Program		Kegiatan				Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Pendidikan	A Skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	16.1 Indeks	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan			
									Jumlah Mahasiswa Penerima BBM	1000 Mahasiswa			
									Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1549 Orang/bulan			
													Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	16.1 Indeks	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	216 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	206 Unit		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Wajib Belajar 9 Tahun	100 %	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	100 %	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	68 Ruang		
							Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4880 Unit		
							Pembinaan Minat, Bakat dan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	73 Satuan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Kreativitas Siswa	Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Pendidikan		
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	73 Satuan Pendidikan		
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	persentase sekolah yang dikelola dengan baik	100 %	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	6 unit		
							Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		
							Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	23 Satuan Pendidikan		
							Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	105 Peserta Didik		
							Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	23 Satuan Pendidikan		
				Pengelolaan Pendidikan	persentase sekolah yang	64 %	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang	175 Peserta Didik		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan							
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
				Anak Usia Dini (PAUD)	dikelola dengan baik				Mengikuti Proses Belajar				
									Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang		
									Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	163 Satuan Pendidikan		
									Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	163 Satuan Pendidikan		
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	persentase lembaga non formal yang dikelola dengan baik	100 %			Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	175 Peserta Didik		
									Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	75 Satuan Pendidikan		
									Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	4 Satuan Pendidikan		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase Sekolah berkurikulum SNP	100 %	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal	persentase sekolah yang berkurikulum	100 %			Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pendidikan Dasar	sesuai standar mutu		Pendidikan Dasar	Pendidikan Dasar yang Tersusun			
							Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen		
							Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	96 Orang		
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	persentase sekolah yang berkurikulum sesuai standar mutu	100 %	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan yang Tersusun	1 Dokumen		
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik Bersertifikasi yang Berprestasi	66 %	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan bersertifikasi	66 %	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	6 Dokumen		
							Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	2 Laporan		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
								Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Hasil Implementasi Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP	84.5 skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	79 dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		
							Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	313 Orang/bulan		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	80 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	273 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi			
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan mencapai target	75 %	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 unit	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas					162 unit	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	778 Unit			
Persentase Indikator SPM Kesehatan Rujukan Mencapai Target					89.13 %	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan	619 Unit			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
								Regional/Regional Maintenance Center				
								Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	25 Paket		
								Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik yang Terpelihara Sesuai Standar	162 Unit		
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Indikator SPM Kesehatan Dasar Mencapai Target	75 %		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2490 Orang		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2377 Orang			
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2264 Orang			
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9218 Orang			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31972 Orang		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115490 Orang		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28597 Orang		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	338 Orang		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0 Orang		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3 Dokumen		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen		
							Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen		
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	338 Orang		
							Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen		
							Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	36 Dokumen		
							Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil	10 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Kabupaten/Kota Sehat	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			
							Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7 Dokumen		
							Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	6 Unit		
							Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang sesuai standar	91 %	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	500 orang	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	500 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Pelayanan Farmasi, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) sesuai Standar	88 %	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 dokumen	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3 dokumen	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	3 Dokumen		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang mengalami kenaikan strata	62,5 %	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 dokumen	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya Jumlah SSK	8 SSK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	7 dokumen	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	7 Dokumen		
		Meningkatnya Kampung KB yang berstandar paripurna	5 Kampung KB	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	Jumlah kelurahan yang telah melakukan updating data keluarga	27 Kelurahan	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Kabupaten/Kota			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	24 Dokumen		
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Menurunnya Unmet Need	7.5 %	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	27 Organisasi	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	27 Organisasi		
							Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 Dokumen		
							Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen		
							Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12 Laporan		
							Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	72 Laporan		
							Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	3 unit	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	3 Unit		
							Penggerakan Kader yang Mengikuti Penggerakan Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Masyarakat Pedesaan (IMP)	150 Orang		
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	22 Laporan	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	22 Laporan		
							Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	651 Orang		
							Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit		
							Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan	4 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya	Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarungnya			
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	7 dokumen	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	7 Kampung		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Kepesertaan Anggota Tribina PUS yang ber-KB	82 %	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	240 Orang	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	240 Orang		
							Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	225 Orang		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				
							Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	32 Laporan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	51 orang/bulan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang yang layak digunakan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	59 unit			
						Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi			
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 Dokumen	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang dibangun	2 Unit		
		Persentase Rawan Banjir/Genangan	18.47 %		Persentase rawan Genangan	18.47 %	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	2 Unit		
							Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	2 Unit		
							Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.5 KM		
							Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100 %	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rumah tangga yang terlayani kebutuhan air minum	100 %	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	1 Dokumen		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.09 %	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	80.09 %	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	20 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	100 M		
							Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	100 M		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100 %	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Mendirikan Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	5 Dokumen		
							Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	40 Dokumen		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Sesuai Ketentuan	100 %	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah	Persentase Bangunan sesuai Ketentuan	100 %	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan	27 Kawasan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Kabupaten/ Kota				Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
							Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	27 Kawasan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantab	95.5 %	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam kondisi mantap	95.5 %	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen		
							Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	1500 M ²		
							Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen		
							Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	1.5 KM		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	10 KM		
							Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur	2 KM		
							Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1.5 KM		
							Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	6 KM		
							Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	10 M2		
							Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 M ²		
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	77.98 %	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga trampil konstruksi yang bersertifikat	100 orang	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	100 Orang		
				Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase pelaku jasa konstruksi yang memenuhi standar kompetensi	95 %	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	80 Orang		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan	Jumlah dokumen tata ruang yang ditetapkan	1 Dokumen	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			
							Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan								
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				Daerah Kabupaten/Kota				Bidang Penataan Ruang							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi Perangkat Daerah	80.20 skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan					
Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			80,20 skor	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan		
Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			80.20 skor									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			80.20 Skor	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket					

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	80,20 skor				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan"	34 orang		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	20 Laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 unit		
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65 unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	1 unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"	106 unit		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Pengembangan Perumahan	100 %	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang dihasilkan	1 Dokumen	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	3 lokasi	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	3 unit rumah		
				Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 %	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah	1 laporan		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	99,5 %	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0.5 %	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen		
		Prosentase kawasan permukiman yang tidak kumuh	99.5 %	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prosentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	0.5 %	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Perumahan Kumuh	3 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	160 unit		
							Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	16.41 ha		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100 %	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase penyelenggaraan PSU perumahan yang memadai	100 %	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	3 lokasi		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Prosentase Pengelolaan Izin Lokasi	100 %	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase pemberian izin lokasi	100 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentase pemberian rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sesuai ketentuan	100 %		
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	100 %	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penatagunaan Tanah	100 %	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Penggunaan Tanah yang hamparannya dalam satu daerah	100 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	10 laporan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai SAKIP	80.10 Indeks	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang /bulan		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit		
							Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Laporan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	68 Unit		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) yang diselesaikan	97 %	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM atuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	78 Orang	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	40 Kasus		
							Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penertiban	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	275 Kasus		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				
							Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	8 Dokumen		
							Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen		
							Peningkatan Kapasitas Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	78 Orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota yang dapat ditangani sesuai SOP	4 Dokumen	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Dokumen		
							Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan		
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Prosentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang berkualitas	100 %	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	12 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 %	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	6 Dokumen		
							Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	6 Laporan		
							Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Prosentase Kegiatan Inspeksi Proteksi Kebakaran	90 %	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT											
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang /bulan		
				Administrasi Umum Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Ditangani	100 %	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen		
							Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang		
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan	100 %	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				kesiapsiagaan terhadap bencana		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200 Orang			
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 Unit				
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 Kawasan				
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	37 Orang				
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300 Orang				
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12 Orang	
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik	12 Orang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase tersusunnya sistem dasar penanggulangan bencana	100 %	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A nilai	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan		
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang /bulan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
					administrasi keuangan daerah		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13 Laporan		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100 persen	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	59 Orang		
							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	142 laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan sarana prasarana aparatur pemerintah	100 persen	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 persen	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan		
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 persen	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	2 unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	110 unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam Pemberdayaan Sosial	58 persen	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dibina	58 persen	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	214 Orang		
							Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang		
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Keluarga		
							Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	14 Lembaga		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100 persen	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	100 persen	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan	165 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial			Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
			Penyediaan Sandang				Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang			
			Penyediaan Alat Bantu				Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang			
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang			
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	62 Orang			
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan	270 Orang			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
							Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang		
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 persen	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		
							Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang		
							Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		
							Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		
							Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	135 Orang		
							Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang		
							Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	91 persen	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	95 persen	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		
Rujukan Anak-Anak Terlantar							Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang			
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan							Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	8 Orang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Anak Terlantar	Kewenangan Kabupaten/Kota			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase fakir miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	24685 Orang		
							Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	4000 Keluarga		
							Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	4000 keluarga		
							Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	56 Orang		
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	100 persen	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	100 persen	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang		
							Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Sosialisasi Kampung Siaga Bencana	100 persen	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung		
							Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman makam Pahlawan dalam kondisi baik	100 persen	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	966 Makam		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Alokasi Anggaran APBD yang di ARG	100 persen	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase program yang di ARG	100 persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	32 Dokumen		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Dokumen		
							Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah		
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Perempuan pada Lembaga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan Pelatihan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	20 persen	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen		
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dibina	55 persen	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	580 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				n Kabupaten/Kota			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen			
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pengaduan Kekerasan Perempuan	Penanganan Tindak Terhadap	100 persen	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapatkan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	98 persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
								Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Perangkat Daerah		
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan	Persentase penyedia layanan yang melaksanakan rujukan lanjutan	85 persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyedia layanan perlindungan perempuan yang aktif	100 persen	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	12 Orang		
							Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase RT yang memiliki data keluarga berkualitas	20 persen	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Persentase peserta yang memahami Kesetaraan Gender dan Hak Anak	85 persen	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Perangkat Daerah		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang aktif dalam peningkatan Kualitas Keluarga dan Hak anak	100 persen	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	257 Orang		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	1 dokumen	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah	Persentase pengumpulan data gender dan anak	100 persen	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen		
		Terpenuhinya Data terpilah gender dan anak	1 dokumen				Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data	2 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Kabupaten/Kota			Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	di Kewenangan Kabupaten/Kota			
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Lembaga yang aktif dalam Pemenuhan Hak Anak	22,43 persen	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka pemenuhan hak anak	22 persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga yang dibina dalam rangka Peningkatan Kualitas Hidup Anak	22 persen	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
							Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyediaan Layanan	Jumlah Dokumen Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyediaan Layanan	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
							Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	0,04 persen	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sekolah yang terlibat dalam perlindungan Anak	40.74 persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	Persentase anak yang mendapatkan Layanan Perlindungan Khusus	100 persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Layanan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Kabupaten/Kota			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang terlibat dalam perlindungan Khusus Anak	100 persen	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80.03 %	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja	Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
				Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang /bulan		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			prosentase pemenuhan dokumen administrasi Kepegawaian	100 %	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah	100 %	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Prosentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Kendaraan Dinas Jabatan				
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit		
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase jumlah peserta pelatihan yang berbasis kompetensi	30 %	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan yang mengikuti Uji Kompetensi	40 orang	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	50 Orang		
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase LPKS yang berijin	20 %	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	27 Lembaga		
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30 perusahaan	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan melalui informasi bursa kerja	15 %	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui informasi bursa kerja	230 orang	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen		
							Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	200 Orang		
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan	16 %	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang mendapatkan bimbingan PP dan PKB	50 perusahaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	15 Perusahaan		
							Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan		
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Prosentase permasalahan HI yang terselesaikan	75 %	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Ber	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			dampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
							Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	5800 Orang		
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase jumlah koperasi yang disetujui permohonan bersertifikat NIK	75 %	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan sertifikat NIK	35 koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	300 orang		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	2.5 %	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah koperasi yang dibina dan jenis usahanya bertambah	5 koperasi	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	130 unit usaha		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Kabupaten/Kota				
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro dibina yang beromzet naik	7.33 %	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina beromzet naik	11 orang	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan dan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	60 Unit Usaha		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat	5 %	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mutu produk dan kapasitasnya meningkat setelah pembinaan	20 IKM	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 dokumen		
							Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	persentase IKM yang mengikuti publikasi produk	10 %	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mengikuti publikasi	40 IKM	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	27 orang/bulan		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	19 paket		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemeliharaan barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit		
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit/ta hun		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang	122 unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Bangunan Lainnya	dipelihara/direhabilitasi			
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase Kecukupan Energi	Angka 100 %	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase ketersediaan pangan utama	100 %	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3 Laporan		
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal							Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	1 laporan			
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan							Pemantauan stok pasokan dan harga pangan	4 dokumen			
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi							Angka Kecukupan Energi / AKE	2100 kkal /kapita	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase daerah rentan dan rawan pangan	25 %	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	1 dokumen	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	2 Dokumen		
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase pangan segar aman yang teruji	80 %	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	8 lokasi	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen		
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah total produksi perikanan budidaya	285 Ton	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ke mitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan) (RTP)	250 RTP	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit		
							Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	100 Orang		
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah total produksi perikanan tangkap	89 Ton	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan/usaha perikanan tangkap yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ke mitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	435 orang	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	2 dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi makanan ikan	15.8 Kg/Kapita/Tahun	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolahan dan pemasar ikan yang dibina	50 orang	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha		
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan skala rumah tangga	26 ton	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Efektivitas sarana pertanian	60 %	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Prosentase ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan petani	75 %	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan		
							Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase jumlah bibit ternak dan produk pakan yang bermutu baik	75 %	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan /Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	12 laporan		
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase pengembangan prasarana yang berfungsi dengan baik	75 %	Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase pengembangan prasarana pertanian	75 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	1 laporan		
Pembangunan Prasarana Pertanian				Prosentase prasarana pertanian yang terbangun/rehabilitasi/dipelihara	25 %	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit			
							Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit		
								Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10 %	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase keberhasilan pelayanan kesehatan hewan	80 %	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4 laporan		
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jenis pelayanan yang direkomendasikan (izin medik veteriner dan paramedik veteriner)	1 jenis	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelayanan jasa medik veterine	1 laporan		
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase jumlah sampel produk asal hewan yang aman dikonsumsi	80 %	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	10 laporan		
							Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	10 Laporan		
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase lahan aman bencana pertanian	74 %	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Luas lahan aman bencana pertanian	1900 Ha/ Tahun	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura,	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan	50 Ha		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							dan Perkebunan	Perkebunan yang Dikendalikan				
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase kelompok tani yang memiliki izin usaha pertanian	12 %	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan oleh otoritas kompeten	2 jenis	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	2 Dokumen			
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Prosentase jumlah SDM pertanian terlatih	20 %	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Pertanian terlatih	200 orang	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	39 Kelompok			
							Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 Unit usaha			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP											
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	Nilai evaluasi implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 orang/bulan			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Prosentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 persen	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket				
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	230 orang				
Administrasi Umum Perangkat Daerah			Prosentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			persentase tercukupinya pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan		
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 persen	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit		
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit		
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	79,49 persen	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi PPLH yang tersedia	1 dokumen	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Prosentase Data Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersedia	79.49 persen	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan informasi kajian LH yang tersedia	1 dokumen	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen		
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampel kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	50 persen	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan / usaha yang dipantau pencegahannya	78 kegiatan / usaha	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen			
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 laporan			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 titik		
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Prosentase jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	100 persen	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	jumlah spesies KEHATI Lokal Daerah	342 spesies	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen		
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	75 persen	Penyimpanan sementara Limbah B3	Prosentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(limbah B3)	17 lokasi	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha integrasi	5 dokumen		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Prosentase pelaku usaha / kegiatan yang taat terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	76,47 persen	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	jumlah Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17 perusahaan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	4 dokumen		
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin							Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan,	10 laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Kabupaten/Kota			Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah			
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100 persen	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	umlah Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	15 kegiatan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen		
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 persen	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	jumlah pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	5 kasus	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	5 dokumen		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan	1 dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	72 persen	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	43780 ton	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 lokasi		
							Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	32280 ton		
							Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0 Kelompok		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 unit			
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	jumlah Pihak Swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi	45 kelompok	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	3 unit			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan		
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang /Bulan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	350 orang		
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46 orang		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket		
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	5 unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	25 unit		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	149 unit		
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	96 %	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KTP EL dan KIA	96 %	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	12 laporan		
		Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	84,5 %				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12 dokumen		
		Presentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	85,5 %	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	96 %	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	12 laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94 %	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Perkawinan dan Akta Perceraian Non Muslim	91 %	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	12 dokumen		
		Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	94,5 %				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	4 layanan		
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian	97 %	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil	12 laporan		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Akurasi database kependudukan	99,15 %	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase update data penduduk	83 %	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	12 dokumen		
		Akurasi Database Kependudukan	99,15 %				Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan	15 dokumen		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100 %	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	12 laporan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Hasil Implementasi Perangkat Daerah	Evaluasi SAKIP	80.4 skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang /bulan	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	
									Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	134 Orang	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi Umum	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan peralatan kantor	100 %	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit		
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan kantor	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Lainnya yang Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya sarana dan prasarana, serta fasilitas perlengkapan lalu lintas	92 %	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	persentasi perlengkapan jalan yang berfungsi baik	85 %	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit		
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan							Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	5 Unit			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				Persentase terminal berfungsi baik	100 %	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit			
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				Persentase fasilitas terselenggaranya pelayanan parkir	100 %	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan lulus uji	100 %	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Bermotor yang Tersedia	10 Unit		
							Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Bermotor yang Terpelihara	12 Unit		
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100 %	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan		
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pengurusan rekomendasi analalin	100 %	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan		
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase terlaksananya kebijakan	100 %	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Orang		
							Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Berkala Kendaraan Bermotor				
							Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan		
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan angkutan umum	100 %	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	41 Unit		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A Skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan		
					Administrasi Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 orang		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase OPD yang memenuhi Standar Layanan Informasi Publik	80 %	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan	100 %	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Dokumen		
							Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan	12 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Kabupaten/ Kota	kebijakan Pemerintah Daerah		Komunikasi Publik	Media Komunikasi Publik			
							Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen		
							Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 Dokumen		
							Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya	26 Orang		
							Penyelenggara an Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen		
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen		
		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang	100 %				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	82 unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		disediakan oleh Dinas Kominfo		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen		
					Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 dokumen				
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 unit				
					Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	2 layanan				
					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen				

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen		
							Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 dokumen		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1 dokumen	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 survey	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen		
							Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	3 Orang		
							Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	Jumlah JKS (Jaring Komunikasi Sandi) yang digunakan	2 JKS	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
				Daerah Kabupaten/Kota			Elektronik dan Non Elektronik	Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				
							Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	34 Perangkat Daerah			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 persen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		
			Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80.03 skor	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang /bulan		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	38 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanaman modal	100 persen	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi yang tersedia	1 buah	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang merealisasikan investasinya	32 persen	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah investor baru	30 investor	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen			
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan terselesaikan	90 persen	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemohon Izin	1700 izin	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1800 Pelaku Usaha	360 Kegiatan Usaha		
							Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	40 Orang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Perizinan dan Non Perizinan	Perizinan dan Non Perizinan			
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM	100 perusahaan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dibina	250 perusahaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	300 Pelaku Usaha		
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	20 kegiatan usaha		
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	100 persen	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Izin Yang Diproses Secara Elektronik	105 jenis izin	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI											
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	100 persen	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Sosialisasi Penataan Persebaran	40 Orang	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	40 Kepala Keluarga		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
		Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	20 persen	Kabupaten/ Kota			Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	30 Orang		
		Persentase Penduduk yang mendapatkan sosialisasi ketransmigrasian	40 %								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	10 %	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Event Kepemudaan yang diselenggarakan	2 Event	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	100 Orang		
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Prosentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	25 %	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	3 Sarpras Olahraga	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terfasilitasi	3 sarana prasarana		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota				
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 Event	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	3 Event		
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang dibina	10 Cabang Olahraga	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Hasil Pengembangan Keolahragaan	1 Organisasi		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	3 Festival Olahraga	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah event festival olahraga yang diselenggarakan	3 Festival Olahraga		
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	A skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang /bulan		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit		
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung			
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase seni budaya yang dilestarikan	100 %	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah obyek kemajuan kebudayaan yang dikembangkan	15 Budaya	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah obyek kemajuan budaya yang dimanfaatkan	10 budaya		
			Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya				Jumlah Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Orang /Group			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							dalam Pemajuan Kebudayaan				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase SDM, lembaga dan pranata kesenian yang dibina	100 %	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah seni budaya yang dibina	3 Jenis	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah seniman yang mendapat pembinaan	45 Orang /Group		
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar budaya dan WBTB yang berpotensi menjadi destinasi wisata	2 Obyek	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	20 Obyek	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilindungi	20 Obyek		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Destinasi wisata daerah	25 %	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah destinasi pariwisata yang dikelola	2 Destinasi	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi pariwisata yang dikembangkan	2 Lokasi		
							Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	12 Lokasi		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase peningkatan pemasaran pariwisata yang diselenggarakan	15 %	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi pariwisata	4 Event	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah promosi pariwisata	4 Event		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	19.5 %	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM pariwisata pembekalan sektor kepariwisataan	19.5 %	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pengembangan SDM ekonomi kreatif	24 Orang		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	82 skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	10 dokumen	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100 %			
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100 %			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase gedung yang layak digunakan	100 %		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor yang layak digunakan	100 %		
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	5.95 %	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	4.6 %	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	74 layanan		
							Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2400 eksemplar		
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca	20 kali	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2600 lokasi		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan		
							Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	1 perpustakaan		
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	37 %	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah karya cetak dan karya rekam koleksi daerah yang dilestarikan	178 eksemplar	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian naskah kuno	2 orang		
							Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah pengadaan/akuisi naskah kuno	2 Eksemplar		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan)	88 skor	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip Dinamis yang telah dibuatkan daftar arsip	100 %	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	58000 berkas		
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana temu balik arsip	100 %	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	260 arsip		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	8,6 skor	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	100 %	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 arsip		
							Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	1000 berkas		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang/bulan		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 unit		
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Prosentase perusahaan yang memperbarui perijinan	100 %	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin	Presentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100 %	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	75 dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Usaha Toko Swalayan			Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase pasar yang dikelola sarana distribusinya	100 %	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dikelola sarana distribusinya	17 pasar	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 unit		
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 unit			
Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dokumen			
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 dokumen			
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pelaksanaan pengawasan bahan pokok dan barang penting	100 %	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan bahan pokok dan barang penting	100 %	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan		
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase Tersalurinya pupuk dan pestisida kepada petani berhak	100 %	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 laporan		
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase UTTP dan BDKT yg telah melakukan tera dan pengawasan BDKT	100 %	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah terlaksananya pelayanan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasannya	12 bulan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	7000 unit		
							Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang		
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase perdagangan produk yang dipromosikan	100 %	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.	4 kali	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	4 UMKM		
							Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	2 dokumen		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	SEKRETARIAT DAERAH											
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi implementasi sakip setda	A Skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang /bulan			
Administrasi Umum Perangkat Daerah					Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Prosentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Penda	100 %	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang urusan Penda	100 %	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase Penyediaan data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	100 %	Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase Laporan Administrasi Pemerintahan yang disusun tepat waktu	100 %	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen		
									Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	7 Dokumen
						Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Prosentase Kerjasama yang difasilitasi	100 %	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
SEKRETARIAT DAERAH												
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	82 skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		
					Administrasi Keuangan Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	83.15 Indeks	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
					Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan BMD dalam kondisi baik	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit			
			Penataan Organisasi	Tingkat Kematangan Organisasi	28.4 skor	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 dokumen			
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 dokumen			
						Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	SEKRETARIAT DAERAH											
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	30.05 Skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	30.05 Skor	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	30.05 Skor	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	10 Orang /Bulan		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	tingkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	30.05 Skor	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	30.05 Skor	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Unit			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	30.05 Skor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	30.05 Skor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit				
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit					
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit					
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase Penyediaan Data Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Pesentase Produk Hukum yang disusun	100 %	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	20 Dokumen				
									Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	25 Kasus		
									Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	400 Dokumen		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	SEKRETARIAT DAERAH											
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Presentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang /Bulan			
Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajaknya	7 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penyediaan Data Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100 %	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase perangkat daerah yang capaian realisasi fisik keuangannya >79% dari target	100 %	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen		
							Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan	12 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pelaksanaan Pembangunan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase realisasi paket pengadaan barang/jasa >79% dari target	100 %	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen		
							Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen		
SEKRETARIAT DAERAH											
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai evaluasi implementasi SAKIP sekretariat daerah	A Skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	33 Indeks	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	33 Indeks	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	
								persentase pemenuhan gaji ASN perangkat daerah	100 %		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	33 Indeks	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100 %	

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	33 Indeks	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100 %		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	33 Indeks	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	33 Indeks	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase kendaraan dinas perorangan/jabatan yang layak digunakan	100 %		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase sarana dan prasarana gedung yang layak digunakan	100 %		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah fasilitas bina mental spiritual	15 kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	33 Indeks	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0 Dokumen		
		Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor								
		Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	33 Skor								
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Sekretariat Daerah	A Skor	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	33 Indeks	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0 Laporan		
							Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen		
								jumlah koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD		2 kegiatan	
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Nilai Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	33 Nilai	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	0 Dokumen		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
SEKRETARIAT DAERAH												
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	163 Orang/bulan		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang tercapai	100 %	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum	100 %	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324 Laporan		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan	100 %	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 unit		
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 unit		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	94 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	129 unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan		
							Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan		
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Rumah Tangga Pimpinan dan Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100 %	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	20 paket		
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	16 paket		
							Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	15 paket		
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Fasilitasi Keprotokolan	100 %	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	500 Laporan		

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	SEKRETARIAT DPRD											
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	81 Skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang /bulan		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100 %		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	19 Orang		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi ASN	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44 Laporan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Alat Penunjang Kantor	100 %	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit						

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana yang Representatif	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peralatan atau Aset Kantor yang Dipelihara	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit			
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	179 Unit			
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Terhadap Hak Keuangan DPRD	100 %	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang /Bulan		
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket			
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Layanan Administrasi DPRD	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi DPRD	100 %	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	8 Laporan		
							Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Layanan Tugas dan Fungsi	81 skor	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Tercapainya Fungsi Pembentukan Perda DPRD	100 %	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	21 Dokumen		
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Tercapainya Fungsi Penganggaran DPRD	100 %	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen		
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Program-Program Pemerintah Daerah	100 %	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		
							Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen		
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Peningkatan SDM Anggota DPRD	100 %	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen		
							Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi	120 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
								dan Dokumentasi Dewan				
							Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen			
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Jumlah Pokir yang Masuk RKPD	100 %	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	90 Dokumen			
PERENCANAAN												
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	25 Skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		
Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah			81 %									
Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah			81 skor									
Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah			A Skor									
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang /bulan			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen			
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0 Laporan				
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja/SKP ASN yang tersusun	100 %	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 orang			
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	67 orang/keg			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	0 Orang				

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Perundang-Undangan			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	1 dokumen	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Sesuai Ketentuan	100 %	Penyusunan Perencanaan dan Pendaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kota	3 Dokumen	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	1 Berita Acara			
Perangkat Daerah/Lintas Daerah							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah	0 Berita Acara			
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara			
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen			
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang	0 Dokumen			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Ditetapkan(RPJPD /RPJMD/RKPD)			
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah dokumen berita acara hasil verifikasi pengendalian rencana kerja perangkat daerah	2 Dokumen	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Dokumen		
							Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	2 Dokumen		
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	100 %	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1 dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 aplikasi		
		Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah	92 %				(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0 Dokumen		
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0 Laporan		
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	26 OPD		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1 dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	1 dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				an dan SDA (Sumber Daya Alam)			Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 perangkat daerah		
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	1 dokumen	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen		
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 OPD		
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	1 dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	6 dokumen		
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	persentase hasil penelitian/kajian yang dapat dimanfaatkan	100 %	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian/Kajian	2 dokumen	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 laporan		
							Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan		
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Inovasi Daerah	1 dokumen	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen		
	KEUANGAN										

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program		Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
	Program		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3000 Orang			
Administrasi Umum Perangkat Daerah					Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan BMD Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan Pemerintahan Daerah	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan			
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan								
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas				
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian						
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit						
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit							
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit							
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Kinerja Keuangan yang memenuhi target	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD tepat waktu	100 %	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	0 Dokumen						
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen						
								Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen						

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	28 Dokumen		
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	0 Dokumen		
							Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	2 Dokumen		
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	0 Dokumen		
							Peraturan Kepala Daerah tentang APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	2 Dokumen		
							Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0 Dokumen		
							Tersusunnya Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen			
				Koordinasi dan	Pengelolaan Keuangan yang	100 %	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi	55 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Sesuai Dengan Peraturan Perundangan		Pengelolaan Kas Daerah	dan Pengelolaan Kas Daerah			
							Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	0 Dokumen		
								Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	3 Dokumen		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Permintaan Laporan Keuangan yang terfasilitasi	100 %	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2 Laporan		
							Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen		
							Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi	4 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah				
							Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	600 Orang			
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase tersusunnya Laporan BTT	100 %	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan			
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Aset yang Berkondisi Baik	100 %	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	22 Laporan	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan			
							Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan			
							Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	18 Laporan			
							Pengelolaan Aset yang Dilindungi		100 %			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	KEUANGAN											
	PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	PENUNJANG URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		
					Administrasi Keuangan Daerah	Prosentase terlaksananya admisnitrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/bulan		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 laporan		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase pemenuhan peralatan/perengkapan kantor yang representatif	100 %		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	35 unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 %		
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Prosentase Peningkatan Data Potensi Wajib Pajak Daerah	10 %	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	100 %	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan perencanaan, pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen		
							Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan	1 dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
								kebijakan Pajak Daerah				
								Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendaftaran dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	1 dokumen		
								Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	1 dokumen		
								Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	4303 WP		
								Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 dokumen		
								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah	8923 Wajib Pajak		
								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	100 %		
								Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah	100 %		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	1 dokumen			
KEPEGAWAIAN												
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen Penganggaran dan Evaluasi	100 persen	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	A skor									
		Nilai SAKIP	A skor									
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 persen	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang /bulan		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 persen	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan		
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang	100 persen	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah	100 persen	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,7 poin	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Realisasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	100 persen	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	2 Laporan		
							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan	160 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
								Administrasi Pemberhentian				
								Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1000 Dokumen		
				Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penyelesaian Administrasi Mutasi dan Promosi	100 persen		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	702 Dokumen		
								Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	455 Dokumen		
				Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Realisasi Pengembangan Kompetensi	100 persen		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	150 Dokumen		
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	100 persen		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		
								Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1429 Orang		
								Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	60 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Realisasi Pengembangan SDM	14 persen	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase realisasi pengembangan kompetensi teknis	85 persen	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	277 Orang			
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti syarat kompetensi jabatannya	80 persen	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	177 Laporan			
INSPEKTORAT DAERAH												
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Prosentse Pemenuhan Dokumen Perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	20 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang /bulan		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	89 Nilai	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Jenis		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65 Laporan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya barang milik daerah	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Lainnya yang Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit				
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3	40 %	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan kegiatan	29 laporan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Laporan				
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan					
Reviu Laporan Kinerja							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	4 Laporan					
Reviu Laporan Keuangan							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan					
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen					
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu							Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3 Laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan serta Asistensi yang terpenuhi	100 persen	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang disusun	2 dokumen	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi			
				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah dokumen hasil pendampingan dan asistensi	7 dokumen	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 perangkat daerah			
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan				
KECAMATAN												
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	80,01 skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang /bulan		

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan						
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				administrasi keuangan				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan		
								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	prosentase Perjanjian Kinerja ASN yang Tercapai	100 %		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang		
							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		
								Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	0 Orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
								Perundang-Undangan			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah urusan pemerintahan daerah	100 %	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit			
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit			
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Perangkat Daerah	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit		
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	90.03 skor	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	persentase hasil koordinasi sarpras pelayanan umum yang ditindaklanjuti	100 %	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan	100 %	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga		
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 %	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100 %	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	100 %	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Perundang-	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-dan/atau	1 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia			
								Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kewenangan yang dijalankan Kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 %	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Himbuan Kepala daerah Yang ditindaklanjuti	100 %	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 Orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							Negara Kesatuan Republik Indonesia					
							Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan			
							Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pmerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 Dokumen			
KECAMATAN												
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai Evaluasi Implementasi Sakip Kecamatan Kartoharjo	80.01 Skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		
			Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	A Skor								
											Administrasi Keuangan	persentase pemenuhan

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Perangkat Daerah	dokumen administrasi keuangan		Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN			
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase perjanjian kinerja ASN yang tercapai	100 %	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Perangkat Daerah	87.75 indeks	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit		
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya pemenuhan kebutuhan jasa urusan pemerintahan daerah	100 %	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tercukupinya Barang Milik Daerah yang layak digunakan	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 unit		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Lainnya yang Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 unit		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	87.8 indeks	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100 persen	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 dokumen		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase lembaga masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 persen	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelurahan yang terklasifikasi swasembada di Kecamatan Kartoharjo	55 persen	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 lembaga		
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengkoordinasian ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	100 persen	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 persen	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16 laporan		
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 persen	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatananjuti	6 laporan			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase kewenangan yang dijalankan kecamatan (tidak dilaksanakan OPD lain)	100 persen	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terfasilitasi pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	100 persen	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	275 orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian			
							Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
							Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 laporan			
							Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	2 dokumen			
	KECAMATAN											
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai SAKIP Kecamatan Taman	80.76 Skor	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang /bulan		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21 Paket		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Laporan			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah yang layak	100 %	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	16 Unit		
							Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	6 Unit		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	88.78 Indeks	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase hasil koordinasi pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	100 %	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100 %	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga		
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengkoordinasian Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100 %	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi hasil penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	100 %	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan		
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10 Laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kewenangan yang dijalankan Kecamatan dan tidak dilaksanakan OPD lain	100 %	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase himbauan Kepala daerah yang ditindaklanjuti	100 %	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	120 Orang		
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4 Laporan			
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan							Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak	3 Dokumen			

No	Program				Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian				
							Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK													
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Nilai SAKIP Daerah	Perangkat Daerah	80.50 Nilai	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang /bulan		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian	100 %	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undang	30 orang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah							Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket		
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi umum	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	80 laporan		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakan	100 %	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	7 unit		
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tercukupinya barang milik daerah yang layak digunakann	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit		
							Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	14 unit		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100 %	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah jenis kegiatan	6 jenis	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	125 Orang		
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pendidikan politik kepada Partai Politik pemenang Pemilu	100 %	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Persentase kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat	100 %	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitaskelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	33 orang		

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan					
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
				Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	125 orang		
							Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah	1 laporan		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Status Kelembagaan Orkemas	68 %	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Tingkat Keaktifan Organisasi Kemasyarakatan	75 %	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	75 orang		
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase koordinasi yang dilakukan dengan pemangku kepentingan	100 %	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah koordinasi	3 kali	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di Daerah	100 orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	400 Orang		
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik yang terfasilitasi	100 %	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik	0 konflik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja orang asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	100 orang		

No	Program			Kegiatan			Sub Kegiatan				
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Prioritas
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		
							Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota	12 dokumen		

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi

Berdasarkan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, maka plafon anggaran sementara Kota Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Plafon Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	250.006.967.425	
1	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	185.583.777.393	
1	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.927.900.000	
1	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.927.900.000	
1	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	175.699.025.000	
1	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	175.699.025.000	
1	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.179.152.000	
1	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.898.202.000	
1	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.950.000	
1	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98.475.293	
1	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.475.293	
1	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679.225.100	
1	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	147.242.800	
1	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	382.278.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.704.300	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	57.557.373.126	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	42.883.547.700	
1	01	002	2.01	008	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.056.207.700	
1	01	002	2.01	016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	40.670.000.000	
1	01	002	2.01	025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	449.340.000	
1	01	002	2.01	028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	708.000.000	
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.481.564.426	
1	01	002	2.02	013	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	200.378.400	
1	01	002	2.02	027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	3.975.043.026	
1	01	002	2.02	037	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	212.633.000	
1	01	002	2.02	038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	522.540.000	
1	01	002	2.02	041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	570.970.000	
1	01	002	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.528.461.000	
1	01	002	2.03	013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	343.425.000	
1	01	002	2.03	016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3.600.000.000	
1	01	002	2.03	017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.011.796.000	
1	01	002	2.03	018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.573.240.000	
1	01	002	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	663.800.000	
1	01	002	2.04	012	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	178.000.000	
1	01	002	2.04	016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	85.000.000	
1	01	002	2.04	017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	400.800.000	
1	01	003			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	5.256.616.906	
1	01	003	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	3.963.725.003	
1	01	003	2.01	001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.657.533.530	
1	01	003	2.01	002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.338.312.674	
1	01	003	2.01	004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	967.878.799	
1	01	003	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.292.891.903	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	01	003	2.02	002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.292.891.903	
1	01	004			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.609.200.000	
1	01	004	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.609.200.000	
1	01	004	2.01	001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	750.000.000	
1	01	004	2.01	002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	859.200.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Kartoharjo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	615.921.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	615.921.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	615.921.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	283.281.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	332.640.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Kartoharjo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	213.127.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	213.127.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	213.127.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	168.577.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	44.550.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 03 Kartoharjo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	238.556.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	238.556.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	238.556.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	177.176.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	61.380.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Klegan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	634.126.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	634.126.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	634.126.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	293.566.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	340.560.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Klegan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	317.626.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	317.626.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	317.626.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	189.916.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	127.710.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 03 Klegan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	639.613.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	639.613.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	639.613.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	306.973.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	332.640.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 04 Klegan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	237.766.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	237.766.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	237.766.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	152.626.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	85.140.000	
Sub Unit Organisasi : SDN Oro - Oro Ombo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	608.658.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	608.658.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	608.658.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	354.228.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	254.430.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Rejomulyo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	233.007.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	233.007.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	233.007.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	139.947.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	93.060.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Rejomulyo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	204.655.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	204.655.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	204.655.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	152.185.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	52.470.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Kanigoro							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	228.732.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	228.732.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	228.732.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	158.442.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	70.290.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Kanigoro							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	405.962.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	405.962.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	405.962.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	254.492.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	151.470.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 03 Kanigoro							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	391.431.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	391.431.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	391.431.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	236.001.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	155.430.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1		2			3	4
Sub Unit Organisasi : SDN Sukosari						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	214.117.000
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	214.117.000
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	214.117.000
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	186.397.000
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	27.720.000
Sub Unit Organisasi : SDN Pilangbango						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	631.589.000
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	631.589.000
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	631.589.000
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	419.729.000
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	211.860.000
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Tawangrejo						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	363.725.500
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	363.725.500
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	363.725.500
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	208.295.500
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	155.430.000
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Tawangrejo						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	230.770.000
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	230.770.000
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	230.770.000
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	141.670.000
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	89.100.000
Sub Unit Organisasi : SDN Kelun						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	368.189.000
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	368.189.000
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	368.189.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	199.889.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	168.300.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Manguharjo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	595.796.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	595.796.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	595.796.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	323.546.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	272.250.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Nambangan Lor							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	663.960.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	663.960.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	663.960.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	372.900.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	291.060.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Nambangan Lor							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	330.088.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	330.088.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	330.088.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	198.418.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	131.670.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Madiun Lor							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	284.162.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	284.162.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	284.162.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	174.272.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	109.890.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Madiun Lor							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	219.149.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1			2		3	4
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	219.149.000
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	219.149.000
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	122.129.000
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	97.020.000
Sub Unit Organisasi : SDN 03 Madiun Lor						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	951.662.000
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	951.662.000
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	951.662.000
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	436.862.000
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	514.800.000
Sub Unit Organisasi : SDN 04 Madiun Lor						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	559.431.000
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	559.431.000
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	559.431.000
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	248.571.000
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	310.860.000
Sub Unit Organisasi : SDN 05 Madiun Lor						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	793.034.000
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	793.034.000
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	793.034.000
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	333.674.000
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	459.360.000
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Nambangan Kidul						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	346.199.000
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	346.199.000
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	346.199.000
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	226.409.000
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	119.790.000
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Nambangan Kidul						

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	260.637.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	260.637.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	260.637.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	176.487.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	84.150.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 03 Nambangan Kidul							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	572.132.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	572.132.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	572.132.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	265.232.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	306.900.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 04 Nambangan Kidul							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	291.092.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	291.092.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	291.092.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	173.282.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	117.810.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Winongo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	598.874.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	598.874.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	598.874.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	279.104.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	319.770.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Winongo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	229.810.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	229.810.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	229.810.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	176.350.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	53.460.000	
Sub Unit Organisasi : SDN Ngegong							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	321.376.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	321.376.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	321.376.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	162.976.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	158.400.000	
Sub Unit Organisasi : SDN Patihan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	530.746.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	530.746.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	530.746.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	253.546.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	277.200.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Pangongangan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	187.714.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	187.714.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	187.714.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	126.334.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	61.380.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Pangongangan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	629.272.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	629.272.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	629.272.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	350.092.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	279.180.000	
Sub Unit Organisasi : SDN Sogaten							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	359.745.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	359.745.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	359.745.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	189.465.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	170.280.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Taman							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	862.871.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	862.871.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	862.871.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	436.181.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	426.690.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Taman							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	208.680.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	208.680.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	208.680.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	133.440.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	75.240.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 03 Taman							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	283.799.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	283.799.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	283.799.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	196.679.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	87.120.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Pandean							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	610.026.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	610.026.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	610.026.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	284.316.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	325.710.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Pandean							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	677.090.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	677.090.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	677.090.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	360.290.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	316.800.000	
Sub Unit Organisasi : SDN Banjarejo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	660.879.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	660.879.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	660.879.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	264.879.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	396.000.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Mojorejo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	333.935.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	333.935.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	333.935.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	224.045.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	109.890.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Mojorejo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	942.348.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	942.348.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	942.348.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	444.378.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	497.970.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Manisrejo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	647.421.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	647.421.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	647.421.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	321.711.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	325.710.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1		2			3	4
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Manisrejo						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	542.898.000
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	542.898.000
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	542.898.000
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	238.968.000
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	303.930.000
Sub Unit Organisasi : SDN 03 Manisrejo						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	355.797.000
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	355.797.000
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	355.797.000
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	188.487.000
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	167.310.000
Sub Unit Organisasi : SDN 04 Manisrejo						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	433.565.000
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	433.565.000
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	433.565.000
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	247.445.000
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	186.120.000
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Demangan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	248.073.000
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	248.073.000
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	248.073.000
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	126.303.000
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	121.770.000
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Demangan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	336.142.000
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	336.142.000
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	336.142.000

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	175.762.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	160.380.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 01 Josenan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	357.420.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	357.420.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	357.420.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	187.140.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	170.280.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 02 Josenan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	445.141.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	445.141.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	445.141.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	270.901.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	174.240.000	
Sub Unit Organisasi : SDN 03 Josenan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	190.489.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	190.489.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	190.489.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	116.239.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	74.250.000	
Sub Unit Organisasi : SDN Kejuron							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	196.334.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	196.334.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	196.334.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	158.714.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	37.620.000	
Sub Unit Organisasi : SDN Kuncen							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	231.239.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	231.239.000	
1	01	002	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	231.239.000	
1	01	002	2.01	023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	148.079.000	
1	01	002	2.01	029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	83.160.000	
Sub Unit Organisasi : SMPN 1							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.997.234.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.997.234.000	
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.997.234.000	
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.075.214.000	
1	01	002	2.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	922.020.000	
Sub Unit Organisasi : SMPN 2							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.571.424.800	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.571.424.800	
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.571.424.800	
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	665.151.000	
1	01	002	2.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	906.273.800	
Sub Unit Organisasi : SMPN 3							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.278.419.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.278.419.000	
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.278.419.000	
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	606.869.000	
1	01	002	2.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	671.550.000	
Sub Unit Organisasi : SMPN 4							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.677.195.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.677.195.000	
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.677.195.000	
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	636.595.000	
1	01	002	2.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.040.600.000	
Sub Unit Organisasi : SMPN 5							

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.290.903.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.290.903.000	
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.290.903.000	
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	780.283.000	
1	01	002	2.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	510.620.000	
Sub Unit Organisasi : SMPN 6							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.511.432.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.511.432.000	
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.511.432.000	
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	767.282.000	
1	01	002	2.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	744.150.000	
Sub Unit Organisasi : SMPN 7							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.598.010.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.598.010.000	
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.598.010.000	
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	724.390.000	
1	01	002	2.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	873.620.000	
Sub Unit Organisasi : SMPN 8							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	966.882.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	966.882.000	
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	966.882.000	
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	324.372.000	
1	01	002	2.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	642.510.000	
Sub Unit Organisasi : SMPN 9							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.226.624.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.226.624.000	
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.226.624.000	
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	701.484.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	01	002	2.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	525.140.000	
Sub Unit Organisasi : SMPN 10							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.412.271.200	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.412.271.200	
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.412.271.200	
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	976.920.000	
1	01	002	2.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	435.351.200	
Sub Unit Organisasi : SMPN 11							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.499.858.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.499.858.000	
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.499.858.000	
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	712.148.000	
1	01	002	2.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	787.710.000	
Sub Unit Organisasi : SMPN 12							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.084.801.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.084.801.000	
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.084.801.000	
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	378.161.000	
1	01	002	2.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	706.640.000	
Sub Unit Organisasi : SMPN 13							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.379.647.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.379.647.000	
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.379.647.000	
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	539.907.000	
1	01	002	2.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	839.740.000	
Sub Unit Organisasi : SMPN 14							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	842.557.000	
1	01	002			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	842.557.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	01	002	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	842.557.000	
1	01	002	2.02	036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	375.477.000	
1	01	002	2.02	042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	467.080.000	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	97.679.733.644	
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.745.191.817	
1	02	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.195.400	
1	02	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.079.900	
1	02	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	121.618.400	
1	02	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.497.100	
1	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.675.045.551	
1	02	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	52.675.045.551	
1	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.247.447.716	
1	02	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.784.227.716	
1	02	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	463.220.000	
1	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.503.150	
1	02	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	346.771.300	
1	02	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.311.400	
1	02	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.420.450	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	39.157.720.997	
1	02	002	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.581.271.780	
1	02	002	2.01	009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	246.629.080	
1	02	002	2.01	014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.976.438.000	
1	02	002	2.01	015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	143.404.500	
1	02	002	2.01	016	Pengadaan Obat, Vaksin	3.128.867.000	
1	02	002	2.01	020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	85.933.200	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.576.449.217	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	02	002	2.02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	891.908.100	
1	02	002	2.02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	67.976.000	
1	02	002	2.02	003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	110.303.450	
1	02	002	2.02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	247.091.000	
1	02	002	2.02	005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	103.130.000	
1	02	002	2.02	006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	119.184.408	
1	02	002	2.02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	69.678.100	
1	02	002	2.02	008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.567.000	
1	02	002	2.02	009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	28.788.000	
1	02	002	2.02	010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	64.735.000	
1	02	002	2.02	011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	52.894.750	
1	02	002	2.02	012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	163.368.900	
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	162.926.250	
1	02	002	2.02	016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	400.507.500	
1	02	002	2.02	017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	109.035.700	
1	02	002	2.02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	115.061.000	
1	02	002	2.02	022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	60.032.200	
1	02	002	2.02	025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	276.645.000	
1	02	002	2.02	026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	27.233.193.164	
1	02	002	2.02	029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	324.124.800	
1	02	002	2.02	034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.279.953.695	
1	02	002	2.02	035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	22.939.200	
1	02	002	2.02	038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	659.406.000	
1	02	003			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	198.360.350	
1	02	003	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.360.350	
1	02	003	2.03	001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.360.350	
1	02	004			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	96.205.700	
1	02	004	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	61.684.700	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	02	004	2.01	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	61.684.700	
1	02	004	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	34.521.000	
1	02	004	2.04	001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	34.521.000	
1	02	005			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.482.254.780	
1	02	005	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	355.011.920	
1	02	005	2.01	001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	355.011.920	
1	02	005	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.127.242.860	
1	02	005	2.03	001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.127.242.860	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.272.406.072	
2	14	002			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	439.867.720	
2	14	002	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	98.183.000	
2	14	002	2.01	007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	98.183.000	
2	14	002	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	341.684.720	
2	14	002	2.02	012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	289.169.720	
2	14	002	2.02	013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	52.515.000	
2	14	003			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.922.669.452	
2	14	003	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	601.248.212	
2	14	003	2.01	001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5.450.900	
2	14	003	2.01	002	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	256.957.200	
2	14	003	2.01	003	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	41.216.200	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	14	003	2.01	004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	75.000.000	
2	14	003	2.01	006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	46.800.000	
2	14	003	2.01	007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	135.823.912	
2	14	003	2.01	008	Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	
2	14	003	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	748.155.200	
2	14	003	2.02	002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	740.654.000	
2	14	003	2.02	004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	7.501.200	
2	14	003	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	452.516.040	
2	14	003	2.03	001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	16.200.000	
2	14	003	2.03	003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	391.017.040	
2	14	003	2.03	006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	31.499.000	
2	14	003	2.03	008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13.800.000	
2	14	003	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	120.750.000	
2	14	003	2.04	003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	120.750.000	
2	14	004			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	909.868.900	
2	14	004	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	909.868.900	
2	14	004	2.01	004	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	199.354.400	
2	14	004	2.01	005	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	421.740.000	
2	14	004	2.01	007	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	288.774.500	
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	144.980.339.134	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.587.028.523	
1	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.808.447.460	
1	02	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.808.447.460	
1	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.239.700.000	
1	02	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.239.700.000	
1	02	001	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	76.538.881.063	
1	02	001	2.10	001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	76.538.881.063	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	43.393.310.611	
1	02	002	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	43.393.310.611	
1	02	002	2.01	008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	544.352.000	
1	02	002	2.01	012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	34.502.467.000	
1	02	002	2.01	013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.933.520.134	
1	02	002	2.01	014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.413.119.000	
1	02	002	2.01	016	Pengadaan Obat, Vaksin	4.999.852.477	
Puskesmas Manguharjo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.439.665.000	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.439.665.000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.439.665.000	
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	210.000.000	
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	310.665.000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.919.000.000	
Puskesmas Ngegong							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.018.616.600	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.018.616.600	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.018.616.600	
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	210.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	342.402.000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.466.214.600	
Puskesmas Sukosari							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.313.990.000	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.313.990.000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.313.990.000	
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	210.000.000	
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	469.350.000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.634.640.000	
Puskesmas Tawangrejo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.991.095.000	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.991.095.000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.991.095.000	
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	210.000.000	
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	249.475.000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.531.620.000	
Puskesmas Banjarejo							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.982.959.000	
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.982.959.000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.982.959.000	
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	210.000.000	
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	672.959.000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.100.000.000	
Puskesmas Demangan							
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2.662.500.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	02	002			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.662.500.000	
1	02	002	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.662.500.000	
1	02	002	2.02	013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	210.000.000	
1	02	002	2.02	015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	536.250.000	
1	02	002	2.02	033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1.916.250.000	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	150.000.416.000	
1	03	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.714.687.105	
1	03	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	
1	03	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000	
1	03	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.792.677.420	
1	03	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.792.677.420	
1	03	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.000.000	
1	03	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	
1	03	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	993.470.000	
1	03	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	987.270.000	
1	03	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.200.000	
1	03	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.791.796.347	
1	03	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.791.796.347	
1	03	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	836.743.338	
1	03	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	370.280.838	
1	03	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	466.462.500	
1	03	002			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12.574.216.000	
1	03	002	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.574.216.000	
1	03	002	2.01	011	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	-	
1	03	002	2.01	028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	235.100.000	
1	03	002	2.01	038	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	3.165.339.960	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	03	002	2.01	046	Normalisasi/Restorasi Sungai	8.075.086.040	
1	03	002	2.01	055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1.098.690.000	
1	03	003			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	21.869.000	
1	03	003	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	21.869.000	
1	03	003	2.01	001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	21.869.000	
1	03	006			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	22.188.093.000	
1	03	006	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	22.188.093.000	
1	03	006	2.01	001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	934.450.000	
1	03	006	2.01	005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	19.195.397.000	
1	03	006	2.01	009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2.058.246.000	
1	03	008			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	38.642.900.000	
1	03	008	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	38.642.900.000	
1	03	008	2.01	001	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	242.900.000	
1	03	008	2.01	002	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	38.400.000.000	
1	03	009			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	18.964.000.895	
1	03	009	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	18.964.000.895	
1	03	009	2.01	003	Penataan Bangunan dan Lingkungan	18.371.066.895	
1	03	009	2.01	004	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	592.934.000	
1	03	010			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	41.965.000.000	
1	03	010	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	41.965.000.000	
1	03	010	2.01	001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	258.292.800	
1	03	010	2.01	002	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	3.015.100.000	
1	03	010	2.01	004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	408.600.000	
1	03	010	2.01	005	Pembangunan Jalan	1.652.330.000	
1	03	010	2.01	006	Pelebaran Jalan Menuju Standar	-	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	03	010	2.01	007	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	13.976.210.000	
1	03	010	2.01	010	Pemeliharaan Berkala Jalan	14.379.050.000	
1	03	010	2.01	011	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.852.247.200	
1	03	010	2.01	012	Pembangunan Jembatan	2.195.180.000	
1	03	010	2.01	019	Pemeliharaan Rutin Jembatan	227.990.000	
1	03	011			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	679.650.000	
1	03	011	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	491.250.000	
1	03	011	2.01	004	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	491.250.000	
1	03	011	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	188.400.000	
1	03	011	2.03	003	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	188.400.000	
1	03	012			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.250.000.000	
1	03	012	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	950.000.000	
1	03	012	2.01	001	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	200.000.000	
1	03	012	2.01	002	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	300.000.000	
1	03	012	2.01	003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	250.000.000	
1	03	012	2.01	004	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	200.000.000	
1	03	012	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
1	03	012	2.03	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	100.000.000	
1	03	012	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
1	03	012	2.04	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	200.000.000	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	39.744.104.195	
1	04	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.865.404.195	
1	04	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.673.400	
1	04	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.673.400	
1	04	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.288.329.160	
1	04	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.227.329.160	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	04	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	61.000.000	
1	04	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	142.950.000	
1	04	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	132.950.000	
1	04	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	
1	04	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.880.000	
1	04	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.880.000	
1	04	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.301.785	
1	04	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.200.000	
1	04	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.101.785	
1	04	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.200.700.000	
1	04	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.200.700.000	
1	04	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.020.569.850	
1	04	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.500.324.850	
1	04	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	
1	04	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	420.245.000	
1	04	002			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.477.810.500	
1	04	002	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	86.150.000	
1	04	002	2.01	006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	86.150.000	
1	04	002	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.295.210.500	
1	04	002	2.03	006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.295.210.500	
1	04	002	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	96.450.000	
1	04	002	2.05	001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	96.450.000	
1	04	003			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	5.723.441.600	
1	04	003	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	95.000.000	
1	04	003	2.02	001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	95.000.000	
1	04	003	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.628.441.600	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	04	003	2.03	001	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	38.736.000	
1	04	003	2.03	002	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	2.222.940.600	
1	04	003	2.03	006	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	3.366.765.000	
1	04	005			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	19.677.447.900	
1	04	005	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	19.677.447.900	
1	04	005	2.01	002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	19.677.447.900	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	131.200.000	
2	10	002			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	15.000.000	
2	10	002	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
2	10	002	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	15.000.000	
2	10	004			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	36.200.000	
2	10	004	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	36.200.000	
2	10	004	2.01	001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.200.000	
2	10	010			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	80.000.000	
2	10	010	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	
2	10	010	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	80.000.000	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.478.373.000	
1	05	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.273.754.000	
1	05	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.974.000	
1	05	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	163.974.000	
1	05	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.038.083.000	
1	05	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.038.083.000	
1	05	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	684.175.000	
1	05	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	684.175.000	
1	05	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	05	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	
1	05	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	359.871.500	
1	05	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	
1	05	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.950.000	
1	05	001	2.07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.850.000	
1	05	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.071.500	
1	05	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.124.753.500	
1	05	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.124.753.500	
1	05	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	752.897.000	
1	05	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	489.677.000	
1	05	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	183.500.000	
1	05	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.720.000	
1	05	002			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.113.091.000	
1	05	002	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.566.566.000	
1	05	002	2.01	001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.525.526.000	
1	05	002	2.01	002	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	812.347.000	
1	05	002	2.01	003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	152.772.000	
1	05	002	2.01	004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.763.046.000	
1	05	002	2.01	005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	312.875.000	
1	05	002	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.442.006.000	
1	05	002	2.02	001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.096.102.000	
1	05	002	2.02	003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	345.904.000	
1	05	002	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	104.519.000	
1	05	002	2.03	001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	104.519.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	05	004			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.091.528.000	
1	05	004	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.074.428.000	
1	05	004	2.01	001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	686.635.000	
1	05	004	2.01	002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	387.793.000	
1	05	004	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	17.100.000	
1	05	004	2.02	001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	17.100.000	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.799.700.000	
1	05	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.386.841.000	
1	05	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.250.000	
1	05	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.250.000	
1	05	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.823.700.000	
1	05	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.823.700.000	
1	05	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.000.000	
1	05	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000	
1	05	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.320.000	
1	05	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.320.000	
1	05	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	321.693.000	
1	05	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	321.693.000	
1	05	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.878.000	
1	05	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.283.000	
1	05	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	
1	05	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.595.000	
1	05	003			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.412.859.000	
1	05	003	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	112.354.000	
1	05	003	2.01	001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	05	003	2.01	002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	62.354.000	
1	05	003	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.144.390.000	
1	05	003	2.02	001	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	
1	05	003	2.02	002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	87.155.000	
1	05	003	2.02	004	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	19.040.000	
1	05	003	2.02	006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	50.650.000	
1	05	003	2.02	008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	888.600.000	
1	05	003	2.02	010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	48.945.000	
1	05	003	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	106.115.000	
1	05	003	2.03	003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	80.475.000	
1	05	003	2.03	004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	25.640.000	
1	05	003	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	50.000.000	
1	05	003	2.04	006	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	50.000.000	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	25.473.007.331	
1	06	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.942.179.640	
1	06	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	360.658.619	
1	06	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	128.694.300	
1	06	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	170.122.119	
1	06	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.842.200	
1	06	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.211.496.463	
1	06	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.088.945.055	
1	06	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	122.551.408	
1	06	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	131.073.000	
1	06	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	104.586.000	
1	06	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26.487.000	
1	06	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	325.541.000	
1	06	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.541.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	06	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.386.500	
1	06	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	161.175.000	
1	06	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.260.000	
1	06	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.515	
1	06	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.289.866.263	
1	06	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	915.466.263	
1	06	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.400.000	
1	06	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	459.157.795	
1	06	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.702.000	
1	06	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	152.421.075	
1	06	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.034.720	
1	06	002			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.589.656.050	
1	06	002	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3.589.656.050	
1	06	002	2.03	001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	396.044.900	
1	06	002	2.03	002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	65.647.800	
1	06	002	2.03	003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	210.899.700	
1	06	002	2.03	004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	2.917.063.650	
1	06	004			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.635.853.661	
1	06	004	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.088.072.181	
1	06	004	2.01	001	Penyediaan Permakanan	204.084.000	
1	06	004	2.01	002	Penyediaan Sandang	25.768.681	
1	06	004	2.01	003	Penyediaan Alat Bantu	35.457.200	
1	06	004	2.01	004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42.300.000	
1	06	004	2.01	005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	10.100.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	06	004	2.01	006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	666.392.900	
1	06	004	2.01	010	Pemberian Layanan Kedaruratan	103.969.400	
1	06	004	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	547.781.480	
1	06	004	2.02	002	Pemberian Layanan Kedaruratan	191.360.500	
1	06	004	2.02	003	Penyediaan Permakanan	95.736.800	
1	06	004	2.02	004	Penyediaan Sandang	20.250.900	
1	06	004	2.02	005	Penyediaan Alat Bantu	10.789.900	
1	06	004	2.02	006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	26.051.380	
1	06	004	2.02	007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	71.700.000	
1	06	004	2.02	010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	117.792.000	
1	06	004	2.02	012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	14.100.000	
1	06	005			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	10.466.050.900	
1	06	005	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	8.668.000	
1	06	005	2.01	001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	3.960.000	
1	06	005	2.01	002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	4.488.000	
1	06	005	2.01	003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	220	
1	06	005	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10.457.382.900	
1	06	005	2.02	001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	919.803.700	
1	06	005	2.02	002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	606.105.400	
1	06	005	2.02	003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	8.903.928.800	
1	06	005	2.02	004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	27.545.000	
1	06	006			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	657.016.400	
1	06	006	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	78.209.900	
1	06	006	2.01	001	Penyediaan Makanan	39.282.600	
1	06	006	2.01	002	Penyediaan Sandang	15.177.300	
1	06	006	2.01	005	Pelayanan Dukungan Psikososial	23.750.000	
1	06	006	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	578.806.500	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
1	06	006	2.02	001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	135.615.200	
1	06	006	2.02	002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	443.191.300	
1	06	007			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	182.250.680	
1	06	007	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	182.250.680	
1	06	007	2.01	002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	182.250.680	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.823.191.100	
2	08	002			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	764.802.900	
2	08	002	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	144.341.900	
2	08	002	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	78.234.400	
2	08	002	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	23.242.500	
2	08	002	2.01	003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.217.000	
2	08	002	2.01	004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	12.648.000	
2	08	002	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.946.000	
2	08	002	2.02	001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	34.946.000	
2	08	002	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	585.515.000	
2	08	002	2.03	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	562.735.000	
2	08	002	2.03	003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.780.000	
2	08	003			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	240.371.000	
2	08	003	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	68.287.000	
2	08	003	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	36.391.000	
2	08	003	2.01	002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	31.896.000	
2	08	003	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	155.907.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	08	003	2.02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	155.907.000	
2	08	003	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.177.000	
2	08	003	2.03	003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	7.518.000	
2	08	003	2.03	004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.659.000	
2	08	004			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	314.350.300	
2	08	004	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	264.579.300	
2	08	004	2.01	001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	83.769.300	
2	08	004	2.01	002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	180.810.000	
2	08	004	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	49.771.000	
2	08	004	2.02	002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.771.000	
2	08	005			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	156.292.900	
2	08	005	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	156.292.900	
2	08	005	2.01	001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	62.698.900	
2	08	005	2.01	002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	93.594.000	
2	08	006			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	264.556.000	
2	08	006	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	43.238.000	
2	08	006	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	43.238.000	
2	08	006	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	221.318.000	
2	08	006	2.02	001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	22.584.000	
2	08	006	2.02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	84.179.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	08	006	2.02	003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.214.000	
2	08	006	2.02	004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.341.000	
2	08	007			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	82.818.000	
2	08	007	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	26.312.000	
2	08	007	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	26.312.000	
2	08	007	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.150.000	
2	08	007	2.02	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	5.750.000	
2	08	007	2.02	004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	28.400.000	
2	08	007	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.356.000	
2	08	007	2.03	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.356.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	9.055.368.662	
2	07	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.809.084.238	
2	07	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.280.000	
2	07	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.280.000	
2	07	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.219.111.176	
2	07	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.219.111.176	
2	07	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	
2	07	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	
2	07	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	700.000.000	
2	07	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000	
2	07	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
2	07	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	703.500.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	07	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	700.000.000	
2	07	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	
2	07	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.193.062	
2	07	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.716.000	
2	07	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.097.025	
2	07	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.380.037	
2	07	003			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	643.811.800	
2	07	003	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	621.802.000	
2	07	003	2.01	001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	621.802.000	
2	07	003	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.054.800	
2	07	003	2.02	001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.054.800	
2	07	003	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.955.000	
2	07	003	2.05	001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	11.955.000	
2	07	004			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	165.600.000	
2	07	004	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	165.600.000	
2	07	004	2.03	001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	99.091.575	
2	07	004	2.03	002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	66.508.425	
2	07	005			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.436.872.624	
2	07	005	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.050.000	
2	07	005	2.01	001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	3.462.000	
2	07	005	2.01	003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	5.588.000	
2	07	005	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.427.822.624	
2	07	005	2.02	002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.460.000	
2	07	005	2.02	005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.392.362.624	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	704.690.406	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	17	005			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	444.620.000	
2	17	005	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	444.620.000	
2	17	005	2.01	001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	444.620.000	
2	17	006			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	59.995.000	
2	17	006	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.995.000	
2	17	006	2.01	001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	59.995.000	
2	17	008			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	200.075.406	
2	17	008	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	200.075.406	
2	17	008	2.01	001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	200.075.406	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	300.288.388	
3	31	002			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	89.492.950	
3	31	002	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	89.492.950	
3	31	002	2.01	003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	22.906.150	
3	31	002	2.01	004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	23.000.000	
3	31	002	2.01	005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	43.586.800	
3	31	004			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	210.795.438	
3	31	004	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	210.795.438	
3	31	004	2.01	002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	210.795.438	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.722.846.900	
2	09	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.302.859.900	
2	09	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	102.025.000	
2	09	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	102.025.000	
2	09	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.975.918.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	09	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.975.918.000	
2	09	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.298.500	
2	09	001	2.05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	44.298.500	
2	09	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	883.667.400	
2	09	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	627.605.500	
2	09	001	2.06	008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.541.900	
2	09	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.520.000	
2	09	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.434.000	
2	09	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.434.000	
2	09	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	291.517.000	
2	09	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.397.000	
2	09	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.497.500	
2	09	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.952.000	
2	09	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.670.500	
2	09	003			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	289.962.000	
2	09	003	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	166.457.000	
2	09	003	2.01	001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	16.713.500	
2	09	003	2.01	002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	117.252.000	
2	09	003	2.01	004	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	32.491.500	
2	09	003	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	123.505.000	
2	09	003	2.04	001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	24.855.000	
2	09	003	2.04	002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	98.650.000	
2	09	004			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	43.842.500	
2	09	004	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	43.842.500	
2	09	004	2.01	001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	43.842.500	
2	09	005			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	86.182.500	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	09	005	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	86.182.500	
2	09	005	2.01	001	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	25.139.500	
2	09	005	2.01	005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	61.043.000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	408.932.000	
3	25	004			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	159.900.000	
3	25	004	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	159.900.000	
3	25	004	2.04	003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
3	25	004	2.04	005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	139.900.000	
3	25	005			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	35.000.000	
3	25	005	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	35.000.000	
3	25	005	2.01	001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	35.000.000	
3	25	006			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	214.032.000	
3	25	006	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	67.141.000	
3	25	006	2.02	001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	67.141.000	
3	25	006	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	146.891.000	
3	25	006	2.03	002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	146.891.000	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	2.876.652.000	
3	27	002			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.000.624.000	
3	27	002	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.930.184.000	
3	27	002	2.01	001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	23.550.000	
3	27	002	2.01	002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.906.634.000	
3	27	002	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.440.000	
3	27	002	2.03	001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	70.440.000	
3	27	003			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	233.727.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
3	27	003	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	16.138.000	
3	27	003	2.01	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	16.138.000	
3	27	003	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	217.589.000	
3	27	003	2.02	003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	52.815.000	
3	27	003	2.02	007	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	8.009.000	
3	27	003	2.02	009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	156.765.000	
3	27	004			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	260.856.000	
3	27	004	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	155.797.000	
3	27	004	2.01	001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	155.797.000	
3	27	004	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	
3	27	004	2.03	002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	15.000.000	
3	27	004	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	90.059.000	
3	27	004	2.04	001	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	25.000.000	
3	27	004	2.04	002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	65.059.000	
3	27	005			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	112.370.000	
3	27	005	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	112.370.000	
3	27	005	2.01	001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	112.370.000	
3	27	006			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	33.600.000	
3	27	006	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	33.600.000	
3	27	006	2.01	002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	33.600.000	
3	27	007			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	235.475.000	
3	27	007	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	235.475.000	
3	27	007	2.01	002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	138.975.000	
3	27	007	2.01	003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	96.500.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	24.949.715.626	
2	11	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.197.299.571	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	11	001	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.000.100	
2	11	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	67.000.100	
2	11	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.148.268.592	
2	11	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.148.268.592	
2	11	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	304.355.825	
2	11	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	154.049.325	
2	11	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.306.500	
2	11	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	245.712.000	
2	11	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.712.000	
2	11	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.550.000	
2	11	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.550.000	
2	11	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.849.159.932	
2	11	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	696.295.004	
2	11	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.152.864.928	
2	11	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.577.253.122	
2	11	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.318.205.722	
2	11	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	189.050.800	
2	11	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.996.600	
2	11	002			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	315.429.000	
2	11	002	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	152.694.000	
2	11	002	2.01	001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	152.694.000	
2	11	002	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	162.735.000	
2	11	002	2.02	002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	162.735.000	
2	11	003			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	923.491.779	
2	11	003	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	663.400.063	
2	11	003	2.01	001	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut	276.787.919	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	11	003	2.01	002	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	386.612.144	
2	11	003	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	260.091.716	
2	11	003	2.02	001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	135.091.916	
2	11	003	2.02	003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	124.999.800	
2	11	004			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	76.700.000	
2	11	004	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	76.700.000	
2	11	004	2.01	001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	76.700.000	
2	11	005			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	75.000.000	
2	11	005	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	75.000.000	
2	11	005	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	75.000.000	
2	11	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	342.740.000	
2	11	006	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	342.740.000	
2	11	006	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	197.740.000	
2	11	006	2.01	003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	145.000.000	
2	11	008			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	614.764.500	
2	11	008	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	614.764.500	
2	11	008	2.01	002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	614.764.500	
2	11	010			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100.000.000	
2	11	010	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100.000.000	
2	11	010	2.01	001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	45.000.000	
2	11	010	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi Penyelesaian Sengketa dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	55.000.000	
2	11	011			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.304.290.776	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	11	011	2.01		Pengelolaan Sampah	4.204.290.776	
2	11	011	2.01	002	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	250.000.000	
2	11	011	2.01	003	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2.239.000.000	
2	11	011	2.01	004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	147.659.200	
2	11	011	2.01	007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.567.631.576	
2	11	011	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	100.000.000	
2	11	011	2.03	002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	100.000.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.256.376.777	
2	12	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.555.385.727	
2	12	001	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.242.000	
2	12	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.892.000	
2	12	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.350.000	
2	12	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.240.561.310	
2	12	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.161.881.310	
2	12	001	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.680.000	
2	12	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.810.000	
2	12	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29.810.000	
2	12	001	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	
2	12	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.154.202	
2	12	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	224.694.116	
2	12	001	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.103.116	
2	12	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.356.970	
2	12	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.000.000	
2	12	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	
2	12	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	12	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.374.912	
2	12	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.374.912	
2	12	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.243.303	
2	12	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.000.000	
2	12	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.552.040	
2	12	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.985.000	
2	12	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	31.329.560	
2	12	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	102.376.703	
2	12	002			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	264.677.400	
2	12	002	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	164.677.400	
2	12	002	2.01	004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90.000.000	
2	12	002	2.01	005	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	74.677.400	
2	12	002	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	100.000.000	
2	12	002	2.03	003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	100.000.000	
2	12	003			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	160.842.000	
2	12	003	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	160.842.000	
2	12	003	2.01	001	Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	65.438.000	
2	12	003	2.01	002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	95.404.000	
2	12	003	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	
2	12	003	2.02	003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	-	
2	12	004			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	275.471.650	
2	12	004	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	74.706.000	
2	12	004	2.01	001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	35.100.000	
2	12	004	2.01	002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	39.606.000	
2	12	004	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	200.765.650	
2	12	004	2.03	005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	200.765.650	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
					DASAR		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	18.539.553.696	
2	15	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.429.468.520	
2	15	001	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.600.000	
2	15	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.600.000	
2	15	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.072.466.452	
2	15	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.072.466.452	
2	15	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	406.290.000	
2	15	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	204.240.000	
2	15	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	202.050.000	
2	15	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.043.000	
2	15	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210.043.000	
2	15	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	452.528.373	
2	15	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.100.000	
2	15	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.428.373	
2	15	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.206.150.695	
2	15	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.206.150.695	
2	15	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	984.390.000	
2	15	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	626.065.000	
2	15	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	222.250.000	
2	15	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	136.075.000	
2	15	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	7.110.085.176	
2	15	002	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.852.340.520	
2	15	002	2.02	001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	52.350.000	
2	15	002	2.02	002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.042.174.800	
2	15	002	2.02	004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.757.815.720	
2	15	002	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	189.200.000	
2	15	002	2.03	004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	189.200.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	15	002	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.026.708.000	
2	15	002	2.04	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.026.708.000	
2	15	002	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	627.634.800	
2	15	002	2.05	001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	232.486.000	
2	15	002	2.05	007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	395.148.800	
2	15	002	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	59.304.000	
2	15	002	2.06	001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	59.304.000	
2	15	002	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	359.616.000	
2	15	002	2.07	004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	359.616.000	
2	15	002	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	946.667.000	
2	15	002	2.08	001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	51.300.000	
2	15	002	2.08	002	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	775.103.000	
2	15	002	2.08	004	Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	120.264.000	
2	15	002	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.048.614.856	
2	15	002	2.09	001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.048.614.856	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18.921.627.070	
2	16	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.099.855.190	
2	16	001	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.000.000	
2	16	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.000.000	
2	16	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.155.263.990	
2	16	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.155.263.990	
2	16	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	
2	16	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	
2	16	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	16	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
2	16	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.500.000	
2	16	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000	
2	16	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.076.641.200	
2	16	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.076.641.200	
2	16	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	465.450.000	
2	16	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.650.000	
2	16	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.000.000	
2	16	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.800.000	
2	16	002			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.019.065.320	
2	16	002	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.019.065.320	
2	16	002	2.01	002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1.555.562.323	
2	16	002	2.01	004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	973.923.328	
2	16	002	2.01	006	Pelayanan Informasi Publik	232.964.450	
2	16	002	2.01	008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	135.415.219	
2	16	002	2.01	010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	-	
2	16	002	2.01	012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas	121.200.000	
2	16	003			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	8.802.706.560	
2	16	003	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.858.900.000	
2	16	003	2.01	002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2	16	003	2.01	003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.758.900.000	
2	16	003	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.943.806.560	
2	16	003	2.02	001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.776.480.000	
2	16	003	2.02	004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	273.700.000	
2	16	003	2.02	007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	502.848.000	
2	16	003	2.02	008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	180.778.560	
2	16	003	2.02	009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	50.000.000	
2	16	003	2.02	010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
					Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	35.000.000	
2	16	003	2.02	011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	125.000.000	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	125.000.000	
2	20	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	125.000.000	
2	20	002	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	
2	20	002	2.01	001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	125.000.000	
2	20	002	2.01	002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	-	
2	20	002	2.01	003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	-	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	292.872.000	
2	21	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	292.872.000	
2	21	002	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	292.872.000	
2	21	002	2.01	003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	41.752.000	
2	21	002	2.01	004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	251.120.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.177.911.047	
2	18	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.486.263.847	
2	18	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.491.000	
2	18	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.491.000	
2	18	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.173.982.800	
2	18	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.173.982.800	
2	18	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.233.794	
2	18	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274.233.794	
2	18	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.700.000	
2	18	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.700.000	
2	18	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	823.932.153	
2	18	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	823.932.153	
2	18	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.924.100	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	18	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.192.000	
2	18	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.816.600	
2	18	001	2.09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.915.500	
2	18	002			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	34.700.000	
2	18	002	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	34.700.000	
2	18	002	2.02	002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	34.700.000	
2	18	003			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	308.848.200	
2	18	003	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	308.848.200	
2	18	003	2.01	002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	308.848.200	
2	18	004			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	687.175.500	
2	18	004	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	687.175.500	
2	18	004	2.01	001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	227.314.000	
2	18	004	2.01	002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	222.501.500	
2	18	004	2.01	003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	237.360.000	
2	18	005			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	462.675.000	
2	18	005	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	462.675.000	
2	18	005	2.01	002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	424.582.500	
2	18	005	2.01	003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	38.092.500	
2	18	006			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	198.248.500	
2	18	006	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.248.500	
2	18	006	2.01	001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	198.248.500	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	39.101.000	
3	32	003			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	39.101.000	
3	32	003	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.101.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
3	32	003	2.01	005	Penyuluhan Transmigrasi	23.301.000	
3	32	003	2.01	006	Pelatihan Transmigrasi	15.800.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.666.546.361	
2	19	002			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	475.000.000	
2	19	002	2.01		Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	475.000.000	
2	19	002	2.01	008	Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	475.000.000	
2	19	003			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.191.546.361	
2	19	003	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.115.546.361	
2	19	003	2.01	003	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	2.115.546.361	
2	19	003	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	460.000.000	
2	19	003	2.02	002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	460.000.000	
2	19	003	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.000.000.000	
2	19	003	2.04	002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1.000.000.000	
2	19	003	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	616.000.000	
2	19	003	2.05	001	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	616.000.000	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	7.902.442.292	
2	22	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.593.342.292	
2	22	001	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	
2	22	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	
2	22	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.142.500.000	
2	22	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.142.500.000	
2	22	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.250.000	
2	22	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.250.000	
2	22	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.000.000	
2	22	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	22	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.800.000	
2	22	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.800.000	
2	22	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.975.792.292	
2	22	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.975.792.292	
2	22	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000	
2	22	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.000.000	
2	22	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
2	22	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	
2	22	002			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.209.100.000	
2	22	002	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.209.100.000	
2	22	002	2.02	001	Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	939.100.000	
2	22	002	2.02	003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	270.000.000	
2	22	003			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	50.000.000	
2	22	003	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
2	22	003	2.01	001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	50.000.000	
2	22	005			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	50.000.000	
2	22	005	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	50.000.000	
2	22	005	2.02	002	Pengembangan Cagar Budaya	50.000.000	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.238.660.866	
3	26	002			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	317.660.866	
3	26	002	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	317.660.866	
3	26	002	2.03	003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000	
3	26	002	2.03	006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	267.660.866	
3	26	003			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	643.000.000	
3	26	003	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	643.000.000	
3	26	003	2.01	002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	643.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
3	26	005			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	278.000.000	
3	26	005	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	278.000.000	
3	26	005	2.01	006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	278.000.000	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.078.962.578	
2	23	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.832.923.152	
2	23	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.118.820	
2	23	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.118.820	
2	23	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.766.524.636	
2	23	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.766.524.636	
2	23	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.407.000	
2	23	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.407.000	
2	23	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.050.000	
2	23	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.840.000	
2	23	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.210.000	
2	23	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	655.822.696	
2	23	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	655.822.696	
2	23	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.000.000	
2	23	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.000.000	
2	23	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	
2	23	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.000.000	
2	23	002			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.040.301.770	
2	23	002	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	349.200.000	
2	23	002	2.01	001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	282.400.000	
2	23	002	2.01	009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	66.800.000	
2	23	002	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	691.101.770	
2	23	002	2.02	001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	591.101.770	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
2	23	002	2.02	002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
2	23	002	2.02	004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	100.000.000	
2	23	003			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	205.737.656	
2	23	003	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	205.737.656	
2	23	003	2.01	001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	106.849.718	
2	23	003	2.01	002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	98.887.938	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	818.942.100	
2	24	002			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	656.180.000	
2	24	002	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	345.182.000	
2	24	002	2.01	002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	345.182.000	
2	24	002	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	310.998.000	
2	24	002	2.02	002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	310.998.000	
2	24	003			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	162.762.100	
2	24	003	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	162.762.100	
2	24	003	2.01	001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	81.211.400	
2	24	003	2.01	002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	81.550.700	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	16.339.577.408	
3	30	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.074.865.806	
3	30	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	894	
3	30	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	894	
3	30	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.504.392.000	
3	30	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.504.392.000	
3	30	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.544.700	
3	30	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	61.544.700	
3	30	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	276.443.200	
3	30	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.443.200	
3	30	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.500.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
3	30	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000	
3	30	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842.400.792	
3	30	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	842.400.792	
3	30	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.691.114	
3	30	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	252.701.714	
3	30	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.336.000	
3	30	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.653.400	
3	30	002			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	164.204.400	
3	30	002	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	164.204.400	
3	30	002	2.01	001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	164.204.400	
3	30	003			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.322.249.628	
3	30	003	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	713.682.428	
3	30	003	2.01	001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	11.046.000	
3	30	003	2.01	002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	702.636.428	
3	30	003	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.608.567.200	
3	30	003	2.02	001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	210.310.000	
3	30	003	2.02	002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.398.257.200	
3	30	004			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	254.657.000	
3	30	004	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	236.664.000	
3	30	004	2.02	001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100.707.000	
3	30	004	2.02	003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	135.957.000	
3	30	004	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.993.000	
3	30	004	2.03	002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	17.993.000	
3	30	006			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	214.569.024	
3	30	006	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	214.569.024	
3	30	006	2.01	001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	205.301.024	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
3	30	006	2.01	002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	9.268.000	
3	30	007			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	309.031.550	
3	30	007	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	309.031.550	
3	30	007	2.01	001	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	129.031.550	
3	30	007	2.01	003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	180.000.000	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH	3.048.644.600	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.253.696.000	
4	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	
4	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000	
4	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	840.696.000	
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	840.696.000	
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.000.000	
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	
4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	
4	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	
4	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.000.000	
4	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	210.000.000	
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.000.000	
4	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000	
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	
4	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.794.948.600	
4	01	002	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	1.449.948.600	
4	01	002	2.01	001	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.214.948.600	
4	01	002	2.01	003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	235.000.000	
4	01	002	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	345.000.000	
4	01	002	2.04	001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	345.000.000	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
4	01				SEKRETARIAT DAERAH	2.566.413.284	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.566.413.284	
4	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	
4	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	
4	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	798.134.736	
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	798.134.736	
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	167.326.280	
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.326.280	
4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.767.050	
4	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.767.050	
4	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.577.108	
4	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.577.108	
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.873.000	
4	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.963.000	
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000	
4	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.410.000	
4	01	001	2.13		Penataan Organisasi	1.381.735.110	
4	01	001	2.13	001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	339.871.000	
4	01	001	2.13	002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	662.366.630	
4	01	001	2.13	003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	379.497.480	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH	2.509.504.644	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.831.850.384	
4	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	
4	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000	
4	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.438.916.360	
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.438.916.360	
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	
4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.500.000	
4	01	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	
4	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	
4	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	242.386.424	
4	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.386.424	
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.047.600	
4	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.547.600	
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.500.000	
4	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.000.000	
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	677.654.260	
4	01	002	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	677.654.260	
4	01	002	2.03	001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	266.750.000	
4	01	002	2.03	002	Fasilitasi Bantuan Hukum	226.275.880	
4	01	002	2.03	003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	184.628.380	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH	3.102.597.567	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.795.731.667	
4	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.358.960	
4	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.358.960	
4	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.596.391.040	
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.596.391.040	
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.194.000	
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.194.000	
4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.917.633	
4	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	
4	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.917.633	
4	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.748.799	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
4	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	297.748.799	
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	746.121.235	
4	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.321.000	
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	707.641.235	
4	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.159.000	
4	01	003			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	306.865.900	
4	01	003	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	107.511.660	
4	01	003	2.02	001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	31.496.300	
4	01	003	2.02	003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	76.015.360	
4	01	003	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	199.354.240	
4	01	003	2.03	001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	92.664.800	
4	01	003	2.03	002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	106.689.440	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH	11.132.933.734	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.547.873.205	
4	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	
4	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	
4	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.025.442.780	
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.025.442.780	
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.000.000	
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.000.000	
4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.265.065	
4	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.265.065	
4	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.215.360	
4	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.215.360	
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.950.000	
4	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28.750.000	
4	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.200.000	
4	01	002			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.248.290.929	
4	01	002	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.248.290.929	
4	01	002	2.02	001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.248.290.929	
4	01	003			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	336.769.600	
4	01	003	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	336.769.600	
4	01	003	2.01	002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	235.984.960	
4	01	003	2.01	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	100.784.640	
4	01	003	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	
4	01	003	2.04	001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01				SEKRETARIAT DAERAH	35.463.703.320	
4	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	35.463.703.320	
4	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
4	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	
4	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.616.719.810	
4	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.616.719.810	
4	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.294.786.000	
4	01	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.294.786.000	
4	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.338.407.600	
4	01	001	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.000.000	
4	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.088.407.600	
4	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	936.055.320	
4	01	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	829.000.000	
4	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.800.000	
4	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.255.320	
4	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.686.554.640	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
4	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.686.554.640	
4	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.657.211.450	
4	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	868.174.950	
4	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000	
4	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	289.036.500	
4	01	001	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.000.000.000	
4	01	001	2.11	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	
4	01	001	2.11	004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000	
4	01	001	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.000.000.000	
4	01	001	2.12	001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.100.000.000	
4	01	001	2.12	002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	575.000.000	
4	01	001	2.12	003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	325.000.000	
4	01	001	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.928.968.500	
4	01	001	2.14	001	Fasilitasi Keprotokolan	1.928.968.500	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	02				SEKRETARIAT DPRD	38.653.217.556	
4	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.399.381.136	
4	02	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.329.977	
4	02	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.329.977	
4	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.679.743.078	
4	02	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.679.743.078	
4	02	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	291.087.294	
4	02	001	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	64.818.894	
4	02	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	226.268.400	
4	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	937.733.258	
4	02	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	937.733.258	
4	02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	348.489.090	
4	02	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	348.489.090	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
4	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.536.057.009	
4	02	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.536.057.009	
4	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713.401.390	
4	02	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	308.841.290	
4	02	001	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	330.921.350	
4	02	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	73.638.750	
4	02	001	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	15.912.152.890	
4	02	001	2.15	001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.553.173.870	
4	02	001	2.15	002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	253.979.020	
4	02	001	2.15	003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	105.000.000	
4	02	001	2.16		Layanan Administrasi DPRD	1.905.387.150	
4	02	001	2.16	002	Fasilitasi Fraksi DPRD	37.957.150	
4	02	001	2.16	003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.867.430.000	
4	02	002			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.253.836.420	
4	02	002	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.781.493.140	
4	02	002	2.01	002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.218.753.660	
4	02	002	2.01	003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1.562.739.480	
4	02	002	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.516.935.100	
4	02	002	2.02	003	Pembahasan APBD	1.516.935.100	
4	02	002	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	574.554.900	
4	02	002	2.03	006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	338.831.780	
4	02	002	2.03	007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	235.723.120	
4	02	002	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	4.204.257.280	
4	02	002	2.04	002	Pendalaman Tugas DPRD	2.003.790.000	
4	02	002	2.04	003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.307.556.800	
4	02	002	2.04	007	Penyusunan Program Kerja DPRD	892.910.480	
4	02	002	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.176.596.000	
4	02	002	2.05	003	Pelaksanaan Reses	1.176.596.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1			2		3	4
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
5	01				PERENCANAAN	10.584.033.044
5	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.189.057.514
5	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.488.787
5	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.129.900
5	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.655.600
5	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.703.287
5	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.268.389.457
5	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.254.954.457
5	01	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.435.000
5	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	470.250.000
5	01	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	160.250.000
5	01	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	310.000.000
5	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.710.800
5	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	404.710.800
5	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.058.485
5	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.058.485
5	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	837.914.000
5	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	837.914.000
5	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.245.985
5	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.834.205
5	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	77.616.000
5	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.795.780
5	01	002			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.417.459.130
5	01	002	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.197.420.880
5	01	002	2.01	003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	138.605.400
5	01	002	2.01	004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	149.241.780
5	01	002	2.01	005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	318.862.660
5	01	002	2.01	007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
					Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	590.711.040	
5	01	002	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	220.038.250	
5	01	002	2.03	001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	93.060.650	
5	01	002	2.03	003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	126.977.600	
5	01	003			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	977.516.400	
5	01	003	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	343.409.120	
5	01	003	2.01	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72.000.000	
5	01	003	2.01	003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	53.280.000	
5	01	003	2.01	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	211.710.620	
5	01	003	2.01	007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.418.500	
5	01	003	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	230.051.400	
5	01	003	2.02	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	47.237.000	
5	01	003	2.02	003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	182.814.400	
5	01	003	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	404.055.880	
5	01	003	2.03	001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138.904.500	
5	01	003	2.03	003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	90.151.380	
5	01	003	2.03	005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	150.000.000	
5	01	003	2.03	007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25.000.000	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.377.973.164	
5	05	002			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.377.973.164	
5	05	002	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.114.178.361	
5	05	002	2.01	002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	938.831.161	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
5	05	002	2.01	012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	175.347.200	
5	05	002	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	263.794.803	
5	05	002	2.04	001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	263.794.803	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	02				KEUANGAN	57.989.854.202	
5	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.825.555.179	
5	02	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	
5	02	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	
5	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.000.000.000	
5	02	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	37.000.000.000	
5	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	400.000.000	
5	02	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	
5	02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.000.000	
5	02	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.000.000	
5	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.101.555.179	
5	02	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.101.555.179	
5	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	238.000.000	
5	02	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	
5	02	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
5	02	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.000.000	
5	02	002			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.224.351.023	
5	02	002	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	918.685.000	
5	02	002	2.01	001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	83.421.000	
5	02	002	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	56.819.000	
5	02	002	2.01	005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	16.876.000	
5	02	002	2.01	006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	16.111.000	
5	02	002	2.01	007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	154.679.000	
5	02	002	2.01	008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan	154.679.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
					APBD		
5	02	002	2.01	009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	436.100.000	
5	02	002	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	45.050.000	
5	02	002	2.02	001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	39.950.000	
5	02	002	2.02	009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5.100.000	
5	02	002	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.138.759.000	
5	02	002	2.03	003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	135.000.000	
5	02	002	2.03	008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	66.000.000	
5	02	002	2.03	009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	80.000.000	
5	02	002	2.03	011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	857.759.000	
5	02	002	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.121.857.023	
5	02	002	2.04	009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.121.857.023	
5	02	003			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.939.948.000	
5	02	003	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.939.948.000	
5	02	003	2.01	005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	97.142.000	
5	02	003	2.01	007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.803.206.000	
5	02	003	2.01	011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	39.600.000	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	02				KEUANGAN	10.376.982.780	
5	02	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.074.685.028	
5	02	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	
5	02	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	
5	02	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.151.715.664	
5	02	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.151.715.664	
5	02	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.648.000	
5	02	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.648.000	
5	02	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.946.030	
5	02	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	146.946.030	
5	02	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	525.875.334	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
5	02	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	525.875.334	
5	02	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.500.000	
5	02	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.725.000	
5	02	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.275.000	
5	02	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.500.000	
5	02	004			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.302.297.752	
5	02	004	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.302.297.752	
5	02	004	2.01	001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	287.100.000	
5	02	004	2.01	003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	185.268.002	
5	02	004	2.01	005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	15.059.430	
5	02	004	2.01	006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	165.000.000	
5	02	004	2.01	007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	183.016.800	
5	02	004	2.01	008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	40.000.000	
5	02	004	2.01	009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	6.993.000	
5	02	004	2.01	010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	99.040.000	
5	02	004	2.01	011	Penagihan Pajak Daerah	310.550.520	
5	02	004	2.01	013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	10.270.000	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	03				KEPEGAWAIAN	9.534.760.099	
5	03	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.117.062.899	
5	03	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.400.000	
5	03	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.400.000	
5	03	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.099.847.949	
5	03	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.099.847.949	
5	03	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.200.000	
5	03	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	323.200.000	
5	03	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.325.950	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
5	03	001	2.07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.325.950	
5	03	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.318.000	
5	03	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	446.318.000	
5	03	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	213.971.000	
5	03	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.336.000	
5	03	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	148.710.000	
5	03	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.925.000	
5	03	002			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.417.697.200	
5	03	002	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.202.560.000	
5	03	002	2.01	004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1.003.200.000	
5	03	002	2.01	006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	89.360.000	
5	03	002	2.01	011	Pengelolaan Data Kepegawaian	110.000.000	
5	03	002	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	461.784.200	
5	03	002	2.02	001	Pengelolaan Mutasi ASN	375.626.200	
5	03	002	2.02	002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	86.158.000	
5	03	002	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	601.710.000	
5	03	002	2.03	002	Pengelolaan Assessment Center	601.710.000	
5	03	002	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	151.643.000	
5	03	002	2.04	002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	14.391.000	
5	03	002	2.04	004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	60.130.000	
5	03	002	2.04	007	Pembinaan Disiplin ASN	77.122.000	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.459.306.900	
5	04	002			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.459.306.900	
5	04	002	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	1.590.042.900	
5	04	002	2.01	003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.590.042.900	
5	04	002	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	869.264.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
5	04	002	2.02	007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	869.264.000	
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01				INSPEKTORAT DAERAH	10.940.924.464	
6	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.760.159.864	
6	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.861.500	
6	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.861.500	
6	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.895.736.674	
6	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.895.736.674	
6	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	764.205.990	
6	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	413.842.990	
6	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.363.000	
6	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.355.700	
6	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.355.700	
6	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	
6	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	
6	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	386.115.900	
6	01	002	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	352.646.300	
6	01	002	2.01	001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	51.712.800	
6	01	002	2.01	002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	129.926.000	
6	01	002	2.01	003	Reviu Laporan Kinerja	24.436.000	
6	01	002	2.01	004	Reviu Laporan Keuangan	128.766.400	
6	01	002	2.01	007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	17.805.100	
6	01	002	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	33.469.600	
6	01	002	2.02	001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5.364.000	
6	01	002	2.02	002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	28.105.600	
6	01	003			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	794.648.700	
6	01	003	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.622.800	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
6	01	003	2.01	001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	6.622.800	
6	01	003	2.02		Pendampingan dan Asistensi	788.025.900	
6	01	003	2.02	002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	129.592.000	
6	01	003	2.02	003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	658.433.900	
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN MANGUHARJO	13.828.303.562	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.024.060.432	
7	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.507.000	
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.507.000	
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.787.398.481	
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.785.398.481	
7	01	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000	
7	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.763.750	
7	01	001	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.500.000	
7	01	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16.263.750	
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.715.000	
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	119.715.000	
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.883.750	
7	01	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.725.250	
7	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.158.500	
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	843.513.545	
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	843.513.545	
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.278.906	
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.865.108	
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000	
7	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.413.798	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	18.152.000	
7	01	002	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	18.152.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
7	01	002	2.03	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	18.152.000	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	344.167.480	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	280.755.080	
7	01	003	2.02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	280.755.080	
7	01	003	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	63.412.400	
7	01	003	2.03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	63.412.400	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	338.346.450	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90.176.600	
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	90.176.600	
7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	248.169.850	
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	248.169.850	
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	103.577.200	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	103.577.200	
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	37.482.000	
7	01	005	2.01	005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	51.076.000	
7	01	005	2.01	007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	15.019.200	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Manguharjo							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	826.683.680	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	593.449.399	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	593.449.399	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	593.449.399	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	233.234.281	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	233.234.281	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	150.800.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	82.434.281	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Sogaten							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	527.330.775	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	424.953.987	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	424.953.987	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	424.953.987	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	102.376.788	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	102.376.788	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	47.919.500	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54.457.288	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Patihan							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	549.980.000	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	447.580.000	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	447.580.000	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	447.580.000	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	102.400.000	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	102.400.000	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50.000.000	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	52.400.000	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Ngegong							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	553.101.600	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	376.301.600	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	376.301.600	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	376.301.600	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	176.800.000	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	176.800.000	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	101.800.000	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.000.000	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Winongo							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN		

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
						948.028.212	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	472.146.352	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	472.146.352	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	472.146.352	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	475.881.860	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	475.881.860	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	406.806.750	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	69.075.110	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Madiun Lor							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	665.881.444	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	470.394.344	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	470.394.344	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	470.394.344	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	195.487.100	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	195.487.100	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	120.487.100	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.000.000	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Pangongangan							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	596.804.394	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	422.765.484	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	422.765.484	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	422.765.484	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	174.038.910	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	174.038.910	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	99.251.000	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	74.787.910	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Nambangan Lor							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	831.758.000	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	725.758.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	725.758.000	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	725.758.000	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	106.000.000	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	106.000.000	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	31.000.000	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	75.000.000	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Nambangan Kidul							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	1.004.781.931	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	438.671.431	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	438.671.431	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	438.671.431	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	566.110.500	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	566.110.500	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	497.200.000	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	68.910.500	
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN KARTOHARJO	14.442.923.487	
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.552.588.037	
7	01	001	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.083.568	
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.083.568	
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.176.001.118	
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.174.001.118	
7	01	001	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.000.000	
7	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.644.320	
7	01	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14.644.320	
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.064.000	
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	136.064.000	
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.865.146	
7	01	001	2.07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
7	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.865.046	
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.014.168.490	
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.014.168.490	
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.761.395	
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.029.066	
7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.157.329	
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.693.000	
7	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.882.000	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	38.656.000	
7	01	002	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	38.656.000	
7	01	002	2.03	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	38.656.000	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	353.186.800	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	269.452.000	
7	01	003	2.02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	269.452.000	
7	01	003	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	83.734.800	
7	01	003	2.03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	83.734.800	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	312.260.650	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	200.338.600	
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	200.338.600	
7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	111.922.050	
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	111.922.050	
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	186.232.000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	186.232.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100.000.000	
7	01	005	2.01	005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	
7	01	005	2.01	007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	11.232.000	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Oro - Oro Ombo							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	578.769.494	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	537.265.700	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	537.265.700	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	537.265.700	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.503.794	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	41.503.794	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	594	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	41.503.200	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Sukosari							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	490.293.731	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	463.782.228	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	463.782.228	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	463.782.228	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	26.511.503	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	26.511.503	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26.511.453	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Klegen							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	906.421.989	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	556.783.020	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	556.783.020	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	556.783.020	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	349.638.969	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	349.638.969	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	305.879.969	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	43.759.000	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Rejomulyo							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	544.932.143	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	505.787.293	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	505.787.293	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	505.787.293	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.144.850	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	39.144.850	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	39.144.800	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Pilangbango							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	513.840.109	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	483.760.059	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	483.760.059	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	483.760.059	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	30.080.050	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	30.080.050	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30.080.000	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Tawangrejo							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	461.308.950	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	425.042.900	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	425.042.900	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	425.042.900	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	36.266.050	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	36.266.050	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	36.266.000	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Kanigoro							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	561.327.180	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	506.945.530	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	506.945.530	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	506.945.530	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	54.381.650	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	54.381.650	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54.381.600	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Kartoharjo							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	506.217.055	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	467.384.605	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	467.384.605	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	467.384.605	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	38.832.450	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	38.832.450	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38.832.400	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Kelun							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	727.043.630	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	474.324.030	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	474.324.030	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	474.324.030	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	252.719.600	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	252.719.600	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	221.200.000	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	31.519.600	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan
1			2		3	4
7					UNSUR KEWILAYAHAN	
7	01				KECAMATAN TAMAN	14.385.717.542
7	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.573.184.392
7	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.086.000
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.086.000
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.381.426.184
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.381.426.184
7	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14.854.000
7	01	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14.854.000
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.572.000
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.572.000
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.832.000
7	01	001	2.07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342
7	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.490.000
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	876.420.108
7	01	001	2.08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	876.420.108
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.994.100
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.522.300
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000
7	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.471.800
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	21.998.400
7	01	002	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	21.998.400
7	01	002	2.03	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	21.998.400
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	343.215.750
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	305.620.750
7	01	003	2.02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	305.620.750

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
7	01	003	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	37.595.000	
7	01	003	2.03	004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	37.595.000	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	338.399.400	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	138.376.000	
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	138.376.000	
7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	200.023.400	
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	200.023.400	
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	108.919.600	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	108.919.600	
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.140.000	
7	01	005	2.01	005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	52.594.400	
7	01	005	2.01	007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	21.185.200	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Mojorejo							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	665.756.765	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	546.493.765	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	546.493.765	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	546.493.765	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	119.263.000	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	119.263.000	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	40.000.000	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	79.263.000	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Pandean							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	635.476.272	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	514.902.000	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	514.902.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	514.902.000	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	120.574.272	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	120.574.272	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	44.531.000	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	76.043.272	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Banjarejo							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	667.240.721	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	537.454.321	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	537.454.321	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	537.454.321	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	129.786.400	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	129.786.400	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	83.300.000	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46.486.400	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Kuncen							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	442.941.932	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	321.833.320	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	321.833.320	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	321.833.320	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	121.108.612	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	121.108.612	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	109.588.612	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	11.520.000	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Manisrejo							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	716.116.804	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	673.116.804	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	673.116.804	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	673.116.804	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	43.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	43.000.000	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.500.000	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	36.500.000	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Kejuron							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	606.316.226	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	551.971.326	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	551.971.326	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	551.971.326	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	54.344.900	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	54.344.900	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.047.200	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	51.297.700	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Josenan							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	753.233.297	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	491.145.017	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	491.145.017	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	491.145.017	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	262.088.280	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	262.088.280	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	217.187.240	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	44.901.040	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Demangan							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	603.734.296	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	523.445.596	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	523.445.596	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	523.445.596	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80.288.700	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80.288.700	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	25.150.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	55.138.700	
Sub Unit Organisasi: Kelurahan Taman							
7					UNSUR KEWILAYAHAN		
7	01				KECAMATAN	842.017.097	
7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	605.582.116	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	605.582.116	
7	01	002	2.02	003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	605.582.116	
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	236.434.981	
7	01	003	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	236.434.981	
7	01	003	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	190.171.781	
7	01	003	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	46.263.200	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.797.724.321	
8	01	001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.093.015.274	
8	01	001	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.837.000	
8	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.837.000	
8	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.000.000	
8	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.861.088.819	
8	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.861.088.819	
8	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	62.815.812	
8	01	001	2.05	010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62.815.812	
8	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	793.150.940	
8	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	593.150.940	
8	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000	
8	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	243.122.703	
8	01	001	2.07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	173.150.000	
8	01	001	2.07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.972.703	
8	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000	
8	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	
8	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
8	01	001	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000	
8	01	002			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	314.049.297	
8	01	002	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	314.049.297	
8	01	002	2.01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	314.049.297	
8	01	003			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.900.062.030	
8	01	003	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	1.900.062.030	
8	01	003	2.01	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	980.581.030	
8	01	003	2.01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	34.353.000	
8	01	003	2.01	005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	885.128.000	
8	01	004			PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	185.337.000	
8	01	004	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	185.337.000	
8	01	004	2.01	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	185.337.000	
8	01	005			PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	593.661.370	
8	01	005	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	593.661.370	
8	01	005	2.01	003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	60.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Plafon Anggaran Sementara	Keterangan	
1					2	3	4
8	01	005	2.01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	533.661.370	
8	01	006			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.711.599.350	
8	01	006	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.711.599.350	
8	01	006	2.01	004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1.335.350.000	
8	01	006	2.01	006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	376.249.350	

4.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 55 klasifikasi belanja daerah terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga dan
- d. Belanja Transfer

Belanja operasi merupakan belanja pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu (1) periode akuntansi. Belanja Tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah ke pemerintah desa.

Pada tahun 2023 plafon anggaran sementara berdasarkan klasifikasi belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan

NO	URAIAN	PALFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	Belanja Pegawai	485.959.400.862,00
2	Belanja Barang dan Jasa	441.819.946.847,00
3	Belanja Bunga	0,00
4	Belanja Subsidi	99.146.000,00
5	Belanja Hibah	13.514.968.195,00
6	Belanja Bantuan Sosial	20.925.427.100,00
7	Belanja Modal	235.100.295.148,00
	a.Belanja Modal Tanah	3.182.000.000,00
	b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.182.442.891,00
	c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.268.605.579,00
	d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.200.363.080,00
	e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.266.883.598,00
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00
8	Belanja Tidak Terduga	3.121.857.023,00
9	Belanja Bagi Hasil	0,00
10	Belanja Bantuan Keuangan	0,00
	TOTAL	1.200.541.041.175,00

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 27 ayat (3), Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Jumlah Pembiayaan Daerah Kota Madiun Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp187.000.000.000,00 yang akan digunakan untuk menutup defisit antara belanja dengan pendapatan. Jumlah tersebut dirinci dalam plafon anggaran pembiayaan Tahun anggaran 2023 yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	187.000.000.000,00
3.1.1	Penggunaan SiLPA	187.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00
3.3	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	187.000.000.000,00
	Sisa Lebih / Kurang Anggaran (SiLPA) Berjalan	0,00

Sumber: BPKAD Kota Madiun 2022

Penerimaan pembiayaan Kota Madiun tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp187.000.000.000,00 yang diharapkan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran APBD tahun 2022 yang tidak bisa direalisasikan maupun pelampauan pendapatan. Sementara proyeksi pengeluaran

pembiayaan sebesar Rp0,00. Sehingga jumlah pembiayaan netto diperoleh sebesar Rp187.000.000.000,00. Sedangkan SiLPA yang diperoleh pada tahun 2023 adalah Rp0,00.

BAB VI

PENUTUP



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 memuat plafon sementara program, kegiatan dan sub kegiatan. Apabila setelah Nota Kesepakatan ini disepakati bersama :


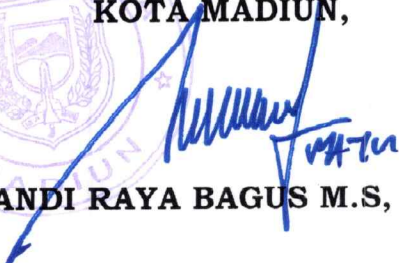
1. Terdapat tambahan pendapatan bersifat umum berupa Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap berpedoman pada Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2023, dengan mengutamakan belanja bersifat wajib dan mengikat sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta belanja pendampingan dan pendukung atas belanja/kegiatan yang bersumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
2. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari belanja atau kegiatan yang tidak dapat direalisasikan hingga akhir Tahun Anggaran 2022 sehingga, Pemerintah Kota Madiun dapat mengalokasikan tambahan SILPA dimaksud untuk digunakan sebagai alokasi anggaran belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Terdapat tambahan SILPA yang berasal dari kegiatan yg bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Madiun untuk di anggarkan kembali sebagai dana mandatory sesuai peruntukkan yang diatur dalam petunjuk teknis dari pemberi dana dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Terdapat dana transfer bersifat khusus dari pemerintah dan bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan pendapatan dimaksud dan belanja berkenaan sesuai peruntukan yang diatur oleh pemberi dana dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.
5. Kebutuhan belanja pendampingan dan belanja pendukung atas kegiatan yang pendanaannya berasal dari pemerintah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang belum tercukupi dari tambahan pendapatan yang diperoleh, Pemerintah Kota Madiun dapat menganggarkan dengan menggeser dari Belanja Tidak Terduga ke belanja operasi pada Perangkat Daerah berkenaan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.


6. Terdapat SILPA positif karena selisih lebih antara pagu anggaran pada PPAS dan RKA-PD atau karena penambahan pendapatan dan pengurangan belanja dalam pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD, Pemerintah Kota Madiun dapat menggunakan SILPA positif tersebut untuk optimalisasi belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai prioritas dan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Terdapat kebijakan dari pemerintah pusat bagi provinsi dan/atau kabupaten/kota dan kebijakan Pemerintah Provinsi untuk kabupaten/kota, maka dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran apabila program dan kegiatan tersebut belum dialokasikan dalam Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah disusun dan disepakati bersama guna dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.

Madiun, 11 Agustus 2022


WALIKOTA MADIUN

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd


**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN,**

ANDI RAYA BAGUS M.S, SH

WAKIL KETUA,

Drs. ISTONO, M.Pd

WAKIL KETUA,

Drs. H. ARMAYA